

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA DENPASAR**



(0361) 428380 

kb.denpasarkota.go.id 



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat-Nyalah telah berhasil disusun Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Denpasar Tahun 2025-2029 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) serta Rencana Kinerja Tahunan.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rencana Strategis Pembangunan Daerah dan Diktum Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Renstra ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar atau disebut juga Renstra Kota Denpasar tahun 2025-2029 dalam urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar. Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman, Acuan atau rujukan yang wajib dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat struktural, fungsional dan pegawai/non struktural/fungsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.



Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih atas peran aktif seluruh karyawan dan karyawan. Khususnya Tim Penyusun serta pihak-pihak terkait “Stakeholders” yang telah memberikan masukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung atas tersusunnya Renstra Ini.

Selanjutnya sangat disadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta lingkungan strategis relatif cepat perkembangannya, oleh karena itu maka Renstra ini juga bersifat Fleksibel. Artinya sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan Iptek dan lingkungan strategis dimaksud. Oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran yang dapat kami pergunakan untuk melakukan review bila diperlukan di masa yang akan datang.

Denpasar, 19 September 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Denpasar



Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19660311 199503 2 001



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHN DAN ISU STRATEGIS	11
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	11
2.2 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	62
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	69
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP3AP2KB	69
3.2 Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	76
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	81
BAB V PENUTUP	176



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar merupakan perencanaan lima tahunan sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran. Fungsi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar dalam pembangunan daerah khususnya pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar merupakan perencanaan pembangunan pada urusan wajib non pelayanan dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun lima tahunan.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat



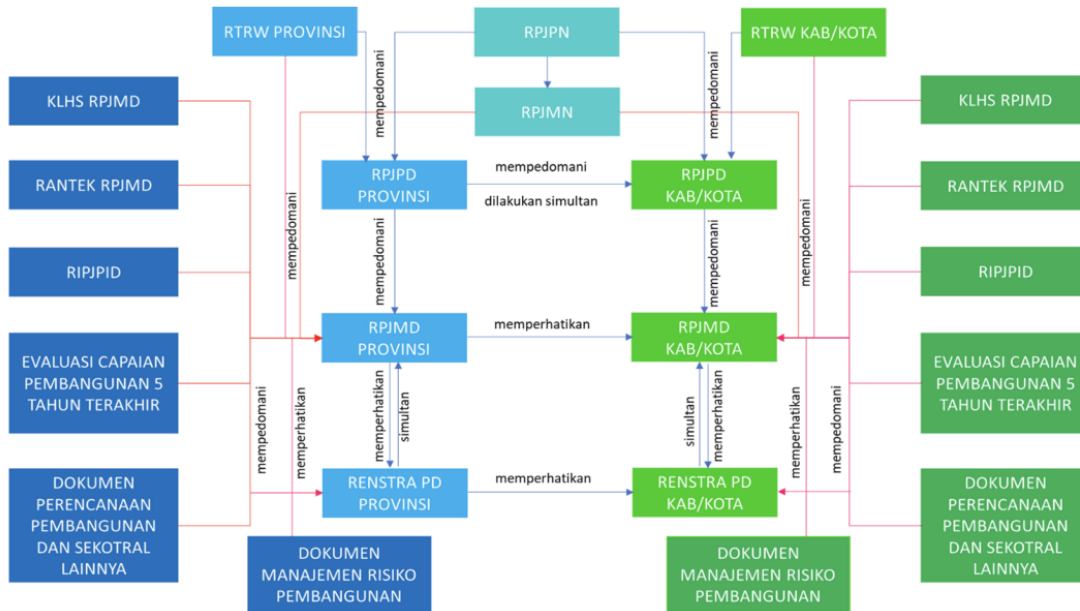
Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Gambaran tentang hubungan antara Renstra DP3AP2KB Kota Denpasar 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan maupun sistem keuangan dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.1
Hubungan antara Renstra DP3AP2KB Kota Denpasar dengan
Dokumen Perencanaan lainnya



1.2 Dasar Hukum

Dalam masa lima tahun, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar sebagai SKPD yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar juga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Renja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :



-
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
 3. Undang - Undang Republik Indonesia tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 52 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);



-
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



-
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7 noreg Peraturan Daerah kota Denpasar, Provinsi Bali: (7,108/ 2022));
 17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3).
 18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah



-
- Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Denpasar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7).
 23. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar merupakan Rencana Pembangunan Kota Denpasar dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu 5 tahun sebagai penjabaran periode ketiga RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 ditetapkan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

a. Maksud

untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Denpasar sebagaimana Visi dan Misi Walikota yang di gambarkan dalam bentuk program, kegiatan , sub kegiatan sehingga setiap *stakeholders* dan komponen masyarakat



dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kota Denpasar yang berdaya guna dan berhasil guna.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025 – 2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun, yang akan digunakan sebagai salah satu bahan masukan dalam penyusunan RPJMD Kota Denpasar dan sekaligus sebagai pedoman dan acuan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Struktural, Fungsional dan karyawan/karyawati di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

1.4. Sistematika

Sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara ringkas: Pengertian Renstra Dinas



P3AP2KB, Fungsi Renstra Dinas P3AP2KB dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra Dinas P3AP2KB, Keterkaitan Renstra Dinas P3AP2KB dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Dinas P3AP2KB ,
Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas P3AP2KB.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas P3AP2KB.

Sitematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas P3AP2KB, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR

- 2.1 Gambaran Pelayanan DP3AP2KB
- 2.2 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DP3AP2KB



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan-pelaksanaan dan penutup.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DP3AP2KB

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan sesuai dengan visi misi Pemerintah Kota Denpasar, maka penyusunan rencana strategis merupakan suatu keharusan. Rencana strategis didasarkan pada struktur organisasi daerah, di mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar merupakan salah satu Perangkat Daerah, sesuai dengan Perwali Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yang memiliki tugas pokok Membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:



- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- d. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi;
- e. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- g. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- h. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- i. UPTD; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Apabila dijabarkan lebih lanjut, uraian tugas masing-masing dijabarkan sebagai berikut.

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas:
 - a) menetapkan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai



-
- dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c) membina bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e) merumuskan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f) menyelenggarakan pelayanan umum dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat;



-
- g) melaksanakan norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - h) mengoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i) melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh data yang akurat;
 - j) melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat;
 - k) melaksanakan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana sesuai prosedur yang berlaku sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal;
 - l) melaksanakan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pengendalian penduduk;
 - m) melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk peningkatan pelayanan;
 - n) melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan keluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan



-
- keluarga sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o) menyelenggarakan pembinaan urusan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - p) membina Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - q) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - r) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - s) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di



-
- lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e) mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas Bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terjalin sinkronisasi perencanaan Pemerintah Kota dengan perencanaan Dinas;
 - f) mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g) menyusun rencana program dan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - h) menyelenggarakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan perencanaan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;



-
- i) menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pengelolaan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk terciptanya tertib administrasi;
 - j) melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
 - k) mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - l) membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
 - m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Sub Bagian umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- a) merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub



Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;

- d) melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) menyusun anggaran belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;
- f) melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g) melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi mempunyai tugas:



-
- a) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi berdasarkan rencana program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - e) menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menentukan kebijakan Pengarusutamaan gender;



-
- f) menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan kebijakan;
 - g) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h) menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - i) menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender;
 - j) melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perencanaan program ke depan;
 - k) menyiapkan rumusan kebijakan, forum koordinasi penyusunan kebijakan, perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan bahan pimpinan dalam pengambilan kebijakan;

- l) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan validitas data dan informasi;
- m) menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- n) menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o) menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai wadah pembinaan;
- p) menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman lembaga pengarusutamaan gender;
- q) menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kesetaraan gender;



-
- r) mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - s) membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Bina Program; dan
 - t) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemenuhan Hak Anak berdasarkan rencana program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Pemenuhan Hak Anak sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemenuhan Hak Anak secara berkala sesuai dengan



-
- peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan, sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga penerapan dan pelayanan terlaksana dengan baik;
 - f) menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus responsive terhadap kepentingan anak;
 - g) menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus responsive terhadap kepentingan anak;
 - h) menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dalam proses perencanaan



dan pelaksanaan pembangunan harus responsif terhadap kepentingan anak;

- i) menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga integrasi pemenuhan hak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan telah responsif terhadap kepentingan anak, penyediaan sarana dan prasarana;
- j) menyiapkan bahan pemberian sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, orientasi, seminar serta bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pemenuhan hak anak dapat terpenuhi;
- k) memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga dapat sebagai bahan kajian dan monitoring serta keberlanjutan program dan kegiatan apakah telah dapat memenuhi pemenuhan hak anak menuju kota layak anak;
- l) melaksanakan Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak dengan penguatan dan pengembangan layanan



-
- peningkatan kualitas hidup anak, memfasilitasi pemenuhan hak anak dengan melaksanakan lomba, mimbar anak, *supercamp*, peringatan Hari Anak Nasional, Denpasar festival, penampilan seni baik di dalam dan luar daerah, sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku sehingga kreatifitas dalam pemenuhan hak anak dapat terpenuhi;
- m) melaksanakan Pelayanan pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya berupa pelatihan ketrampilan bahasa, seni dan budaya, berekreasi, kegiatan lomba, penampilan seni anak baik di dalam dan luar daerah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam pemenuhan hak anak sehingga pengetahuan, kreativitas, dan daya imajinasi anak dapat berkembang;
 - n) melaksanakan Pemenuhan Hak Anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi melalui Komunikasi, Informasi & Edukasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Anak melalui media cetak, media elektronik, pembinaan, ceramah, penyuluhan, seminar, orientasi pemenuhan sarana dan prasarana serta tempat bermain anak, pemenuhan akta kelahiran, kartu identitas anak, pendidikan, kesehatan, rekreasi serta hak anak berpendapat, ajang curhat anak, ajang bermain anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan pemahaman dan partisipasi baik anak, keluarga, swasta/dunia usaha, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama serta masyarakat terhadap pemenuhan hak anak dapat terwujud;
 - o) melaksanakan Pemenuhan Hak Anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan menjamin kelangsungan hidup ibu bayi dan anak, menjamin kualitas tumbuh kembang balita, anak usia sekolah, meningkatkan upaya perlindungan kesehatan dan partisipasi anak, menjamin pendewasaan usia perkawinan,



-
- memenuhi ASI eksklusif, pojok ASI, perilaku hidup bersih dan sehat, pengenalan senam karakter, pengenalan alat permainan edukatif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dan kesejahteraan dapat segera terwujud;
- p) melaksanakan kegiatan bersama Pusat Pelayanan Keluarga untuk memberikan parenting, dan layanan konseling, kepada orang tua, anak, guru dan masyarakat, *stakeholder* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan pemahaman mereka meningkat;
 - q) menyiapkan sarana prasarana bagi anak seperti perpustakaan/pojok baca anak, taman/kebun anak, desa ramah anak, zona aman sekolah, serta sarana prasarana lainnya untuk anak yang bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, swasta, dunia usaha, Desa/Kelurahan, serta masyarakat yang peduli terhadap kebutuhan anak sesuai prosedur yang berlaku sehingga pemenuhan hak anak tercapai;
 - r) menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak sesuai prosedur yang berlaku sehingga pemenuhan hak anak tercapai;
 - s) menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku untuk pemenuhan hak anak;
 - t) menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku untuk pemenuhan hak anak;



-
- u) menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam pemenuhan hak anak;
 - v) menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam pemenuhan hak anak;
 - w) menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - x) menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam pemenuhan hak anak;
 - y) menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam pemenuhan hak anak;
 - z) mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemenuhan Hak Anak dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - aa) membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pemenuhan Hak Anak; dan



-
- bb) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak berdasarkan rencana program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan



-
- orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f) menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g) membentuk forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h) membentuk forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i) menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 - j) menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah



tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pedoman pelaksanaan tugas;

- k) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m) melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- n) melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;



-
- o) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman;
 - p) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahan;
 - q) menyusun Standar Operasional Prosedur penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 - r) menyusun Standar Operasional Prosedur penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pedoman pelaksanaan tugas;



-
- s) melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan;
 - t) melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan;
 - u) menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - v) membentuk forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai kelancaran pelaksanaan tugas;
 - w) menyusun perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan kebijakan;
 - x) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - y) melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak sesuai dengan ketentuan



-
- peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- z) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman;
- aa) menyusun Standar Operasional Prosedur penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- bb) melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan;
- cc) menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- dd) membentuk forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai kelancaran pelaksanaan tugas;
- ee) menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan kebijakan;



-
- ff) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - gg) melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - hh) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman;
 - ii) mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - jj) membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Penagihan; dan
 - kk) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
6. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas:



-
- a) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan berdasarkan rencana program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e) melaksanakan program kegiatan sub bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - f) melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana sesuai prosedur yang berlaku agar target kinerja yang tercapai;
 - g) melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi, kesehatan reproduksi remaja, penyuluhan kepada institusi masyarakat, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Sub Pembantu



-
- Pembina Keluarga Berencana Desa dan Kader sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pemahaman institusi masyarakat meningkat;
- h) melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana yang mandiri, serta pengelolaan data dan informasi program kepada Koordinator Kecamatan, Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana, Institusi Masyarakat Pedesaan, Fasilitas kesehatan dan jejaring Keluarga Berencana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga kualitas data dan kemampuan pengelola data dan informasi program meningkat;
 - i) menyusun kajian data dan informasi program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pimpinan;
 - j) melaksanakan perumusan kebijakan pedoman teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - k) mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - l) membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan; dan
 - m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



7. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan rencana program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) melaksanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program jaminan dan pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;



-
- f) mengendalikan pelaksanaan kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi meliputi jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi sesuai prosedur agar target tercapai;
 - g) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi meliputi jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan kepada pimpinan;
 - h) merumuskan, melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana serta Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - i) melaksanakan Program Keluarga Berencana untuk pengendalian kelahiran dan menuju keluarga yang berkualitas sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - j) melaksanakan Program Pelayanan Kontrasepsi, penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana, penyediaan alat kontrasepsi untuk menjamin dan peningkatan kepesertaan akseptor keluarga berencana sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran tugas;
 - k) melaksanakan pengumpulan program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan perencanaan kegiatan; melaksanakan Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga untuk

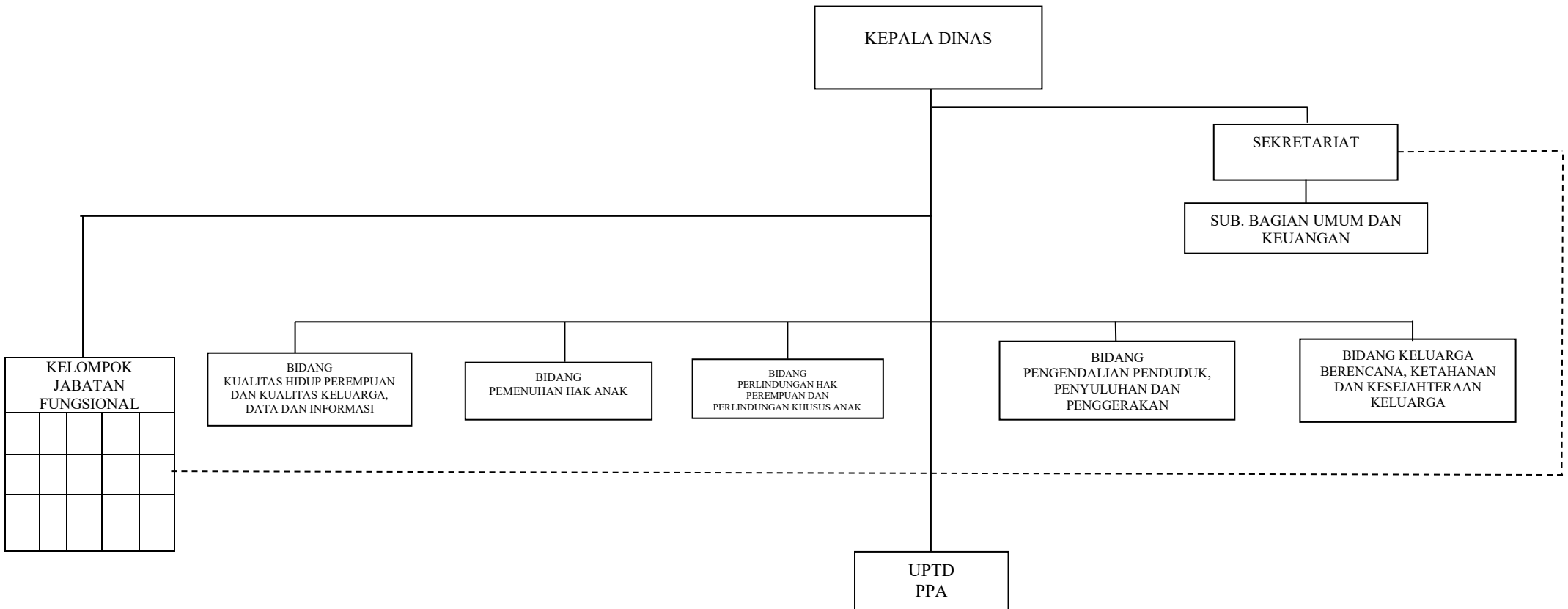


-
- pelaksanaan kegiatan tribina dan uppks sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan perencanaan kegiatan;
- l) melaksanakan Program Pengembangan Model Operasional Bina Keluarga Balita dan Anak-Posyandu - Pendidikan Anak Usia Dini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memahami kegiatan kesehatan dan tumbuh kembang anak;
 - m) melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga untuk mencapai keluarga sejahtera sesuai dengan pedoman untuk kelancaran tugas;
 - n) mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - o) membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala; dan
 - p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



Pemerintah Kota Denpasar

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA





2.1.2 Sumber Daya Aparatur DP3AP2KB

Jumlah personil Aparatur Sipil Negara pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar pada Tahun 2025 sebanyak 72 (tujuh puluh dua orang) yang terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, PPPK sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan Tenaga Non PNS sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

Kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perangkat Daerah DP3AP2KB Kota Denpasar Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SD				1			1
2	SMP Sederajat		-	1	-			1
3	SMA Sederajat	-	2	10	2	1	2	17
4	D3	-	-	-	-	1		1
5	D4	-	-	-	-			-
6	S1	2	24	-	5	12	5	48
7	S2	-	4	-	-			4
8	S3	-	-	-	-			-
	Jumlah	2	30	11	6	14	7	72

Uraian analisis kondisi pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan



Keluarga Berencana berdasarkan tingkat pendidikan adalah pegawai dengan tingkat Pendidikan Sekolah Dasar sejumlah 1 orang, SMP sederajat sejumlah 1 orang, SMA Sederajat sejumlah 17 orang, D3 sejumlah 1 orang, S1 sejumlah 48 orang, S2 sejumlah 4 orang. Kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan golongan Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Perangkat Daerah
DP3AP2KB Kota Denpasar Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	-	-	-
2	Golongan III	2	25	27
3	Golongan IV	5	-	5
4	Golongan IX (PPPK)	12	5	17
	JUMLAH	3	33	36

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan golongan Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah pegawai Golongan III sejumlah 27 orang, Golongan IV sejumlah 5 orang dan Golongan IX (PPPK) sejumlah 17 orang.

Kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.3****Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan dan jenis Kelamin Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Eselon I	-	-	-
2	Eselon II	-	1	1
3	Eselon III	-	4	4
4	Eselon IV	-	2	2
6	JFT	-	8	8
7	PPPK	1	-	1
	JUMLAH	1	15	16

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan Jenis Jabatan Perangkat DP3AP2KB Daerah Tahun 2025 adalah sejumlah 1 orang pegawai dengan jabatan Eselon II, 4 orang Eselon III, 2 orang Eselon IV, 8 orang JFT dan 1 orang PPPK.

B. Sarana dan Prasarana (Aset)

Aset yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Bangunan 3 Unit	3	0	3
2.	Kendaraan roda 4	10	1	11
3.	Kendaraan Roda 2	63	0	63
4.	Mesin Ketik	0	0	0
5.	Rak Besi	3	0	3
6.	Filling Kabinet	18	0	18
7.	White board	9	0	9
8.	Lemari Kayu	10	0	10
9.	Rak Kayu	19	0	19
10.	Meja kayu/ Rotan	13	0	13



11.	Kursi Besi	48	0	48
12.	Kursi Kayu	0	0	0
13.	Meja rapat	6	0	6
14.	Meja Telp	3	0	3
15.	Meja Reception	2	0	2
16.	Kursi Tamu	6	0	6
17.	Kursi Putar	13	0	13
18.	Kursi Biasa	8	0	8
19.	Kursi Lipat	17	0	17
20.	Meja Computer	20	0	20
21.	Meja Biro	5	0	5
22.	Sofa	3	0	3
23.	Jam Elektronik	1	9	10
24.	AC	25	3	28
25.	Kipas Angin	2	4	6
26.	Televisi	3	1	4
27.	Sound Sistem	2	0	2
28.	Loud Speker	5	1	6
29.	Wireles	2	0	2
30.	Mikrophone Floor Stand	2	2	4
31.	Stabilalator	1	0	1
32.	Tangga Almunium	1	1	2
33.	Handy Cam	0	2	2
34.	Laptop	0	0	0
35.	Note Book	16	8	24
36.	Printer	35	5	40
37.	CPU	2	3	5
38.	Meja Kerja Eselon II	2	0	2
39.	Meja Kerja Eselon III	6	0	6
40.	Meja Kerja Eselon IV	11	0	11
41.	Meja Rapat Eselon II	1	0	1
42.	Meja tamu ruang tunggu	1	0	1
43.	Meja Tamu eselon III	5	0	5
44.	Kursi rapat Eselon II	8	0	8
45.	Kursi Kerja Eselon II	1	0	1
46.	Kursi Kerja Eselon III	5	0	5
47.	Kursi Kerja Eselon IV	11	0	11
48.	Kursi Tamu eselon III	5	0	5
49.	Camera + Attachment	3	1	4
50.	Peralatan Vidio Visual lainnya / Kabel	7	0	7



51.	Pesawat Telpon	9	0	9
52.	Handy Talky	0	0	0
53.	Facximile	1	0	1
54.	Lemari buku	2	0	2
55.	Meubelair Lainnya / Spon Kursi Tamu	4	0	4
56.	Microphone Table Stand	6	0	6
57.	Camera Vidio	0	4	4
58.	Personal Computer	32	0	32

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar

Hasil pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar menurut Urusan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya kapasitas lembaga Pemenuhan Hak Anak dan menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap anak

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar selama tahun 2014 hingga 2018 konsisten berada pada kategori Nindya, kemudian berhasil mencapai kategori Utama (melebihi target mendapatkan kategori Nindya) pada tahun 2019. Kategori Skor KLA yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ditunjukkan pada tabel 2.5.



Tabel 2.5
Kategori Skor KLA yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Skor	Kategori
500-600	Pratama
601-700	Madya
701-800	Nindya
801-900	Utama
901-1000	KLA

Sumber: Bahan Advokasi Kebijakan KLA Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Hal ini menandakan bahwa Kota Denpasar hampir mencapai KLA dengan meningkatkan indikator KLA yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Oleh karena itu, untuk kedepannya penguatan kelembagaan dan hak anak harus terus ditingkatkan untuk mencapai sebuah kota dengan sistem pembangunan berbasis hak anak. Capaian skor KLA Kota Denpasar ditunjukkan pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Capaian Skor KLA Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026

No	Skor KLA	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Target	Predikat	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	KLA
2.	Realisasi	Predikat	Utama	Utama	Utama	Utama	-	-

Sumber: LKjIP DP3AP2KB Kota Denpasar 2021-2024

2. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan

Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan diukur dengan dua indikator kinerja utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Perkembangan nilai IPG dan IDG menunjukkan hasil yang cukup signifikan dan dapat dilihat pada table 2.7 dan 2.8.



Tabel 2.7
Capaian IPG Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026

No	Indeks IPG	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Target	Indeks	96,77	96,77	96,77	96,77	96,77	96,77
2.	Realisasi	Indeks	96,88	96,92	97	97,39	-	-
3.	Capaian	Indeks	100,11	100,16	100,24	100,64	-	-

Sumber : BPS Kota Denpasar

Tabel 2.8
Capaian IDG Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026

No	Indeks IDG	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Target	Indeks	62,16	62,16	62,16	62,16	62,16	62,16
2.	Realisasi	Indeks	67,02	67,21	69,22	69,22	-	-
3.	Capaian	Indeks	107,82%	108,12%	111,36%	102,99%	-	-

Sumber : BPS Kota Denpasar

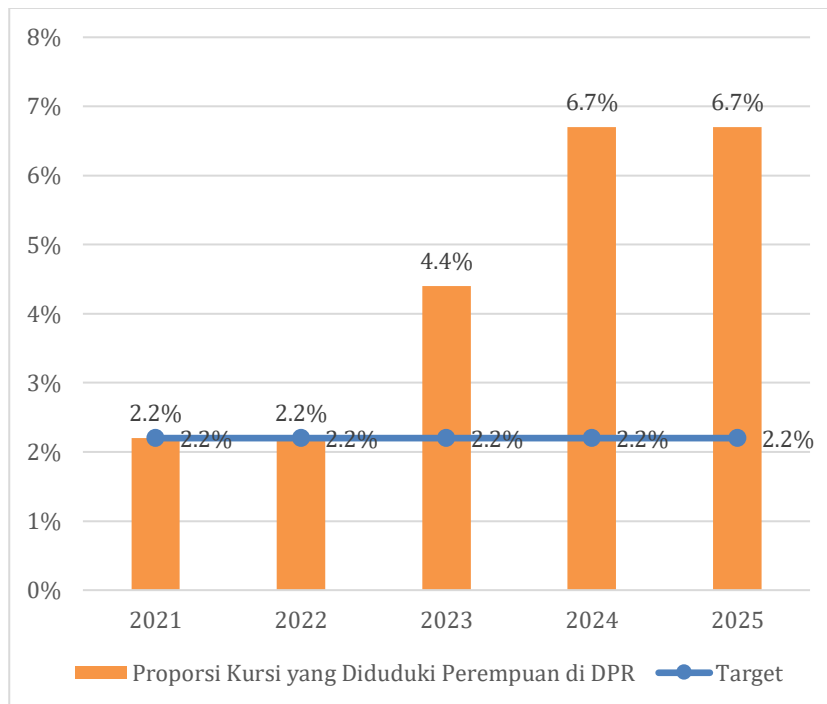
Capaian Indeks Pemberdayaan Gender tidak terlepas dari capaian perempuan di parlemen. Pada tahun 2021 hingga tahun 2025 proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Denpasar mengalami peningkatan yang signifikan. Persentase partisipasi perempuan di DPR Tahun 2021 sampai dengan 2025 disajikan pada tabel 2.9.

Tabel 2.9
Persentase Partisipasi Perempuan di DPR di Kota Denpasar Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	Jiwa	1	1	2	3	3
2.	Jumlah anggota DPR	Jiwa	45	45	45	45	45
3.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	2,2	2,2	4,4	6,7	6,7
4.	Target	%	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
5.	Capaian	%	100	100	100	100	100

Sumber : LKJIP DP3AP2KB Kota Denpasar

Perkembangan persentase partisipasi perempuan di DPR dibandingkan dengan target Kota Denpasar ditunjukkan pada gambar 2.3.1.



Gambar 2.3.1
Perkembangan Persentase Partisipasi Perempuan di DPR
Dibandingkan Target Kota Denpasar Tahun 2021–2025
Sumber: Hasil Olahan, 2025

3. Meningkatkan Keluarga Berkualitas

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Capaian indeks iBangga di Kota Denpasar mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 sampai 2024 yang dapat dilihat pada tabel 2.10.



Tabel 2.10
Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) di Kota Denpasar
Tahun 2021 – 2026

No	Indeks ibangga	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Target	Indeks	n/a	n/a	55,70	56,80	57,30	58,30
2.	Realisasi	Indeks	56,8	58,97	59,69	67,95	-	-
3.	Capaian	-	-	-	107,16%	119,63%	-	-

Sumber: Siperindu BKKBN, 2025

Dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Kegiatan BKKBN, pemerintah berusaha menurunkan angka ini menjadi 9,91% di tahun 2019, sedangkan dalam target BKKBN sesuai dengan target SPM Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota targetnya lebih tinggi lagi yaitu diturunkan hingga 5% di tahun 2014. Mengacu pada kedua target tersebut, selama tahun 2014 hingga tahun 2019 Kota Denpasar berhasil melebihi target BKKBN sesuai Peraturan Kepala BKKBN Nomor 4 Tahun 2018, namun belum dapat mencapai target SPM Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55 Tahun 2010 pada kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.11.



Tabel 2.11

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

NO	Indikator	Target Renstra DP3AP2KB					Realisasi Capaian					Rasio Capaian Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Predikat Kota Layak Anak	Nindya	utama	utama	utama	utama	utama	utama	utama	utama	utama	utama	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	78,75	96,67	96,67	96,77	96,77	96,92%	96,88	96,92	97	97,39	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60	62,16	62,16	62,16	62,16	62,16%	67,02	67,21	69,22	69,22	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)	-	n/a	n/a	55,70	56,80	-	56,8	58,97	59,69	67,95	-%	-%	-%	100%	100%	



Tabel 2.12 Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024 (Renstra Periode yang Lalu)

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM : PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0	408.427.500	1.135.951.900	701.963.000	0	384.139.000	939.849.621	515.144.027	0	94	83	73	72	-22%
	KOTA														
	Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	0	224.397.500	165.394.600	70.708.500	0	215.409.000	159.183.550	63.917.500	0	96	96	91	-68	-6%
	Sub Kegiatan :														
	- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	0	104.577.500	88.599.650	29.704.500	0	101.189.000	85.388.600	27.193.500	0	97	96	92	-72	-5%
	- Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	0	119.820.000	76.794.950	41.004.000	0	114.220.000	73.794.950	36.724.000	0	95	96	90	-66	-6%
	Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	184.030.000	970.557.300	631.254.500	0	168.730.000	780.666.071	451.226.527	0	92	80	71	243	-22%
	Sub Kegiatan :														
	- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	0	184.030.000	970.557.300	631.254.500	0	168.730.000	780.666.071	451.226.527	0	92	80	71	243	-22%



Pemerintah Kota Denpasar

2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	336.624.480	270.855.064	370.662.744	301.127.100	134.858.288	91.920.000	208.686.744	210.969.100	61	30	67	74	-11	21%
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	54.440.000	94.250.000	93.449.130	139.320.100	53.940.000	75.730.000	83.457.500	135.161.100	99	80	89	97	156	-2%
	Sub Kegiatan :														
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	54.440.000	94.250.000	93.449.130	139.320.100	53.940.000	75.730.000	83.457.500	135.161.100	99	80	89	97	156	-2%
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	201.784.500	176.605.064	175.553.614	116.300.000	20.908.288	16.190.000	28.511.000	30.316.000	10	9	16	26	-42	152%
	Sub Kegiatan :														
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	201.784.500	176.605.064	175.553.614	116.300.000	20.908.288	16.190.000	28.511.000	30.316.000	10	9	16	26	-42	152%
	KEGIATAN : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.399.980	0	101.660.000	45.507.000	60.010.000	0	96.718.244	45.492.000	75	0	95	100	-43	34%
	Sub Kegiatan :														
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	80.399.980	0	101.660.000	45.507.000	60.010.000	0	96.718.244	45.492.000	75	0	95	100	-43	34%
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0	42.032.500	174.311.490	24.529.350	0	42.032.500	174.001.850	24.529.350	0	100	100	75	-42	-25%



Pemerintah Kota Denpasar

	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	37.640.000	47.493.300	10.062.300	0	37.640.000	47.493.300	10.062.300	0	100	100	50	-73	-50%
	Sub Kegiatan :														
	- Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	33.640.000	37.431.000	0	0	33.640.000	37.431.000	0	0	100	100	0	-100	-100%
	- Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	4.000.000	10.062.300	10.062.300	0	4.000.000	10.062.300	10.062.300	0	100	100	100	152	0%
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	4.392.500	126.818.190	14.467.050	0	4.392.500	126.508.550	14.467.050	0	100	100	100	229	0%
	Sub Kegiatan :														
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	4.392.500	70.893.690	14.467.050	0	4.392.500	70.584.050	14.467.050	0	100	100	100	229	0%
	- Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	55.924.500	0	0	0	55.924.500	0	0	0	100	0	-100	0%
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0	60.555.000	63.154.640	71.348.400	0	60.555.000	62.654.640	68.387.400	0	100	99	94	18	-6%
	Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	60.555.000	63.154.640	71.348.400	0	60.555.000	62.654.640	68.387.400	0	100	99	94	18	-6%
	Sub Kegiatan :														
	- Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	0	21.605.000	21.354.640	23.848.400	0	21.605.000	20.854.640	21.337.400	0	100	98	89	10	-11%
	- Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	0	38.950.000	41.800.000	47.500.000	0	38.950.000	41.800.000	47.050.000	0	100	100	99	22	-1%



Pemerintah Kota Denpasar

5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0	465.772.000	944.732.928	697.671.100	0	461.212.000	938.216.000	639.863.100	0	99	99	80	50	-19%
	Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0	270.000.000	547.931.183	482.984.000	0	268.440.000	543.197.950	441.578.000	0	99	99	89	79	-10%
	Sub Kegiatan :														
	- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0	48.450.000	147.066.220	170.805.000	0	47.550.000	146.612.800	141.295.000	0	98	100	83	253	-16%
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	221.550.000	400.864.963	312.179.000	0	220.890.000	396.585.150	300.283.000	0	100	99	96	41	-4%
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	195.772.000	396.801.745	214.687.100	0	192.772.000	395.018.050	198.285.100	0	99	100	70	10	-29%
	Sub Kegiatan :														
	- Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	89.050.000	112.299.670	79.149.350	0	87.550.000	111.228.850	63.143.350	0	98	99	80	-11	-19%
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	39.700.000	61.437.550	0	0	38.200.000	61.437.550	0	0	96	100	0	55	-100%
	- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	25.750.000	47.074.755	43.999.750	0	25.750.000	46.918.350	43.999.750	0	100	100	100	71	0%
	- Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	41.272.000	175.989.770	91.538.000	0	41.272.000	175.433.300	91.142.000	0	100	100	100	122	0%
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	200.740.500	330.944.936	380.516.251	237.359.000	26.192.688	146.475.600	256.164.835	155.875.000	4	53	75	44	18	907%
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	200.740.500	56.200.000	149.500.000	0	26.192.688	32.400.000	149.464.000	0	13	58	100	0	-100	-100%



Pemerintah Kota Denpasar

	Sub Kegiatan :														
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200.740.500	56.200.000	149.500.000	0	26.192.688	32.400.000	149.464.000	0	13	58	100	0	-100	-100%
	Kegiatan : Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten /Kota	0	172.438.936	171.286.386	119.180.000	0	27.400.000	50.451.100	53.696.000	0	16	29	45	-31	184%
	Sub Kegiatan :														
	- Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	0	0	0	119.180.000	0	0	0	53.696.000	0	0	0	45	0	0%
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0	172.438.936	171.286.386	0	0	27.400.000	50.451.100	0	0	16	29	0	-100	-100%
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	102.306.000	59.729.865	118.179.000	0	86.675.600	56.249.735	102.179.000	0	85	94	86	16	2%
	Sub Kegiatan :														
	- Penguatan jejaring antar lembaga perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	0	0	0	49.159.000	0	0	0	42.159.000	0	0	0	86	0	0%
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	102.306.000	59.729.865	69.020.000	0	86.675.600	56.249.735	60.020.000	0	85	94	87	-33	3%
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0	69.065.000	411.251.320	219.800.000	0	69.065.000	409.399.800	219.800.000	0	100	100	100	218	0%
	Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0	69.065.000	411.251.320	219.800.000	0	69.065.000	409.399.800	219.800.000	0	100	100	100	218	0%
	Sub Kegiatan :														
	- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0	47.400.000	64.200.000	0	0	47.400.000	64.002.800	0	0	100	100	0	-100	-100%



Pemerintah Kota Denpasar

	- Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	0	4.265.000	239.651.320	86.000.000	0	4.265.000	237.997.000	86.000.000	0	100	99	100	1.916	0%
	- Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga	0	0	101.400.000	121.800.000	0	0	101.400.000	121.800.000	0	0	100	100	20	0%
	- Pengolahan dan Pelaporan data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	0	17.400.000	6.000.000	12.000.000	0	17.400.000	6.000.000	12.000.000	0	100	100	100	-31	0%
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.717.414.000	3.496.402.000	2.995.396.700	3.566.920.200	964.058.600	861.964.806	1.910.523.993	3.260.550.402	49	58	61	62	108	26%
	Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	74.328.000	242.915.000	757.777.500	817.527.200	72.300.000	238.248.000	751.589.700	792.438.802	97	98	99	98	1.000	0%
	Sub Kegiatan :														
	- Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	74.328.000	40.500.000	88.474.700	49.600.000	72.300.000	35.958.000	85.223.000	49.500.000	97	89	96	100	-33	3%
	- Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0	62.400.000	113.900.000	82.700.000	0	62.400.000	113.620.000	82.700.000	0	100	100	100	33	0%
	- Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0	70.640.000	150.000.000	150.000.000	0	70.640.000	150.000.000	146.850.000	0	100	100	98	112	-2%
	- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	0	25.000.000	201.434.800	96.124.200	0	24.875.000	199.783.200	91.207.360	0	100	99	95	284	-5%
	- Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0	4.375.000	84.370.500	263.353.000	0	4.375.000	83.646.000	246.431.442	0	100	99	94	5.919	-6%
	- Pengendalian Program KKBPK	0	40.000.000	119.597.500	175.750.000	0	40.000.000	119.317.500	175.750.000	0	100	100	100	339	0%
	Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	0	206.400.000	163.253.200	301.000.000	0	206.400.000	153.410.000	248.050.000	0	100	94	85	46	-15%
	Sub Kegiatan :														
	- Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan PKB/PLKB	0	0	77.253.200	129.000.000	0	0	67.410.000	129.000.000	0	0	87	100	67	15%
	- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0	206.400.000	86.000.000	172.000.000	0	206.400.000	86.000.000	119.050.000	0	100	100	69	-17	-31%



Pemerintah Kota Denpasar

	Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	0	2.978.087.000	2.003.366.000	2.383.243.000	0	348.716.806	935.156.293	2.155.071.600	0	53	75	90	-20	69%
	Sub Kegiatan :														
	- Pengendalian Pendistribusian Alkon dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes	0	0	72.900.000	0	0	0	67.500.000	0	0	0	93	0	0	0%
	- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0	1.713.820.000	1.860.328.000	770.485.000	0	303.052.206	811.528.293	543.496.600	0	18	44	71	-55	299%
	- Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	0	24.000.000	38.100.000	45.000.000	0	21.375.000	24.240.000	45.000.000	0	89	64	100	88	12%
	- Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	0	0	32.038.000	64.950.000	0	0	31.888.000	64.525.000	0	0	100	99	103	0%
	- Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	1.240.267.000	0	1.502.808.000	0	24.289.600	0	1.502.050.000	0	0	0	0	21	0%
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	471.346.000	69.000.000	71.000.000	65.150.000	428.630.600	68.600.000	70.368.000	64.990.000	91	99	99	98	-86	8%
	Sub Kegiatan :														
	- Integrasi Pembangunan Lintas Sektor	0	0	9.000.000	3.750.000	0	0	8.928.000	3.600.000	0	0	99	96	-58	-3%
	- Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	471.346.000	69.000.000	62.000.000	61.400.000	428.630.600	68.600.000	61.440.000	61.390.000	91	99	99	100	-87	10%
	Kegiatan : Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	351.262.000	0	0	0	295.352.000	0	0	0	84	0	0	0	-100	-100%
	Kegiatan : Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	820.478.000	0	0	0	167.776.000	0	0	0	20	0	0	0	-100	-100%
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	748.949.000	3.985.740.000	3.917.699.030	4.733.430.000	413.194.000	1.296.541.579	3.790.071.750	4.634.042.452	68	29	92	90	532	32%



Pemerintah Kota Denpasar

Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	563.319.000	3.985.740.000	3.908.699.030	502.530.000	294.694.000	1.296.541.579	3.781.071.750	403.592.452	72	58	85	80	-11	11%
Sub Kegiatan :														
- Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	75.999.000	192.000.000	360.000.000	300.000.000	75.894.000	164.300.000	235.280.000	239.085.000	100	86	65	80	295	-20%
- Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	487.320.000	0	26.999.030	202.530.000	218.800.000	0	24.091.750	164.507.452	45	0	89	81	-94	81%
- Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	3.793.740.000	3.521.700.000	0	0	1.132.241.579	3.521.700.000	0	0	30	100	0	-7	235%
Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	185.630.000	0	9.000.000	4.230.900.000	118.500.000	0	9.000.000	4.230.450.000	64	0	100	100	2.179	57%
- Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	0	0	9.000.000	709.200.000	0	0	9.000.000	708.750.000	0	0	100	100	7.780	0%
- Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0	0	0	1.677.000.000				1.677.000.000	0	0	0	100	0	0%
- Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	0	0	0	1.844.700.000				1.844.700.000	0	0	0	100	0	0%
Kegiatan : Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	185.630.000	0	0	0	118.500.000	0	0	0	64	0	0	0	-100	-100%



Pemerintah Kota Denpasar

10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.829.110.901	9.564.422.856	10.317.101.282	13.744.299.731	9.182.957.152	9.365.003.040	9.809.223.278	11.559.340.660	73	69	91	83	40	14%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.790.369.945	6.420.683.700	6.700.242.686	9.488.061.297	6.304.061.033	6.357.912.479	6.416.470.623	8.000.272.894	93	99	96	84	40	-9%
	Sub Kegiatan :														
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.790.369.945	6.420.683.700	6.700.242.686	9.488.061.297	6.304.061.033	6.357.912.479	6.416.470.623	8.000.272.894	93	99	96	84	40	-9%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.940.622	408.596.456	526.623.812	637.882.250	322.627.120	404.987.000	474.550.179	527.280.395	91	99	87	82	81	-11%
	Sub Kegiatan :														
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	297.817.954	335.503.488	296.901.627	395.479.250	272.176.120	332.214.300	294.616.010	330.221.000	91	99	99	83	33	-9%
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.030.168	14.920.968	18.621.858	20.385.000	14.804.000	14.894.700	14.907.800	14.711.000	98	100	80	72	36	-27%
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.972.500	28.132.000	40.207.327	59.724.000	21.952.000	28.078.000	37.351.200	55.125.000	100	100	93	92	172	-8%
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.120.000	30.040.000	170.893.000	162.294.000	13.695.000	29.800.000	127.675.169	127.223.395	76	99	75	78	796	4%
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	211.083.000	288.971.000	0	0	188.428.000	278.700.500	0	0	89	96	37	8%
	Sub Kegiatan :														
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	211.083.000	288.971.000	0	0	188.428.000	278.700.500	0	0	89	96	37	8%
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.060.975.152	2.111.984.700	2.080.161.784	2.452.535.184	1.989.345.124	2.022.538.665	1.958.602.976	1.949.972.934	84	54	87	56	19	-33%
	Sub Kegiatan :														
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.800.000	134.400.000	120.600.000	111.600.000	66.846.772	85.785.909	84.828.456	100.843.357	53	64	70	90	-11	70%
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.932.175.152	0	1.955.511.784	2.340.935.184	1.919.498.352	0	1.869.899.520	1.849.129.577	99	0	96	79	21	-20%
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	1.977.584.700	4.050.000	0	3.000.000	1.936.752.756	3.875.000	0	100	98	96	0	-100	-100%



Pemerintah Kota Denpasar

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.825.182	623.158.000	798.990.000	876.850.000	566.923.875	579.564.896	771.171.500	803.113.937	94	95	97	96	40	2%	
Sub Kegiatan :															
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.650.000	43.772.000	40.100.000	40.700.000	31.733.800	40.806.300	38.000.900	38.430.900	97	93	95	94	25	-3%	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	488.345.000	505.386.000	453.670.000	504.980.000	434.151.075	465.475.600	432.849.550	435.580.500	89	92	95	86	3	-3%	
- Pemeliharaan mebel	0	0	6.000.000	10.000.000			6.000.000	9.960.000	0	0	100	100	67	0%	
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	60.920.000	73.670.000			58.740.000	72.744.000	0	0	96	99	21	2%	
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103.830.182	74.000.000	200.000.000	220.000.000	101.039.000	73.282.996	199.976.300	219.189.537	97	99	100	100	112	2%	
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	38.300.000	27.500.000			35.604.750	27.209.000	0	0	93	99	-28	6%	
JUMLAH TOTAL	12.832.838.881	18.694.216.856	20.710.778.285	24.298.447.881	10.721.260.728	12.778.908.525	18.498.792.511	21.288.501.491	84	68	89	88	89	5%	



2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar mengampu 2 (dua) urusan dengan 4 (empat) jenis layanan publik yaitu:

- a) Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak (Nayaka Prana)
- b) Layanan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- c) Layanan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)
- d) Layanan KB dan Alat Kontrasepsi

Kelompok sasaran layanan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:

- Perempuan Korban Kekerasan
- Anak Korban Kekerasan
- Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan pendampingan
- Perempuan yang berpartisipasi dalam bidang politik
- Angkatan Kerja Perempuan
- Lembaga Penyedia Layanan Keluarga (Ayah, ibu dan anak)
- Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan

Kelompok sasaran layanan pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

- Desa dan Kelurahan dalam hal pembangunan keluarga melalui program bangga kencana
- Pengguna Alat Kontrasepsi

2.1.5 Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pemberian pelayanan, Dinas P3AP2KB Kota Denpasar bekerja sama dengan UPTD Polresta Kota Denpasar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan



anak. Untuk pelayanan KB, Dinas P3AP2KB bekerja sama dengan sejumlah Faskes KB di Kota Denpasar.

2.2 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

2.2.1 Permasalahan DP3AP2KB

Isu-isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan terhadap yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikemukakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut.

a. Permasalahan terkait dengan kesekretariatan :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
2. Belum Optimalnya Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas P3AP2KB Kota Denpasar
3. Kurang memadai sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas P3AP2KB Kota Denpasar



4. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih kurang
5. Belum Optimalnya Kualitas administrasi, dokumen Keuangan Dinas P3AP2KB Kota Denpasar

b. Permasalahan terkait dengan kualitas hidup perempuan :

1. Masih terdapatnya kesenjangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
2. Belum optimalnya dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Kota Denpasar
3. Belum optimalnya data terpilah
4. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam mengemukakan pendapat, kepemimpinan dan peran perempuan dalam jabatan publik dan politik serta masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislative

c. Permasalahan yang terkait dengan Perlindungan Perempuan

1. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan baik di ranah privat dan ranah publik
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan kekerasan yang dialami
3. Kesenjangan ekonomi dan permasalahan sosial diperkirakan menjadi salah satu faktor utama masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan
4. Masih belum optimalnya Satgas Perlindungan Perempuan di Kota Denpasar



d. Permasalahan yang terkait dengan Kualitas Keluarga :

1. Belum optimalnya peran ibu dalam keluarga
2. Kurang optimalnya pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga

e. Permasalahan yang terkait dengan Sistem Data Gender dan Anak:

1. Masih rendahnya persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak
2. Masih rendahnya data permasalahan perempuan dan anak

f. Permasalahan yang terkait dengan Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Belum optimalnya Partisipasi anak dalam Pembangunan (partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan)
2. Masih adanya perkawinan pertama dibawah usia 18 tahun
3. Keberadaan dan Pemanfaatan pojok ASI belum maksimal
4. Isu Kesehatan mental remaja dimana banyak remaja yang tidak menyadari pentingnya kesehatan mental dan tidak mencari bantuan ketika mengalami masalah kesehatan
5. Ketersediaan lembaga yang memberikan layanan edukasi kesehatan reproduksi (Kespro) kesehatan Psikologi dan mental belum memadai

g. Permasalahan yang terkait dengan Perlindungan Khusus Anak

1. Masih terjadinya kasus kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual, fisik, psikis di ranah privat dan publik serta penelantaran



2. Masih adanya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak yang memerlukan perlindungan khusus seperti anak korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum (ABH), pekerja anak, anak dengan disabilitas, anak korban NAPZA, anak dengan HIV/AIDS
3. Pengaruh negatif dari globalisasi dan perkembangan teknologi bagi anak dan remaja
4. Belum optimalnya PATBM di Kota Denpasar

h. Permasalahan yang terkait dengan Pengendalian Penduduk

1. Belum Maksimalnya Pengendalian Kuantitas /kualitas penduduk
2. Belum maksimalnya Kemitraan , jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kejasama global, termasuk pelaksanaan pengelolaan program Banggakencana di Kampung KB
3. Inovasi , teknologi informasi komunikasi program bangga kencana belum maksimal
4. Belum maksimalnya ratio PKB dengan jumlah desa lurah , pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB(PKB/PLKB) belum optimal

i. Permasalahan yang terkait dengan Keluarga Berencana (KB)

1. Belum Optimalnya pemahaman keluarga tentang program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Banggakencana)
2. Terdapat kecenderungan peserta KB lebih memilih metode KB non-MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) seperti suntikan, dibandingkan dengan MKJP seperti AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim). Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian populasi dalam jangka panjang.



3. Partisipasi KB Pria MOP Masih Rendah
4. Kebutuhan ber-KB pasangan Usia Subur yang belum terlayani

j. Permasalahan yang terkait dengan Keluarga Sejahtera

1. Belum Optimalnya pemanfaatan Poktan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
2. Belum Optimalnya Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja, calon pengantin, pasca salin/ kelahiran Baduta/ Balita)

2.2.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan isu Strategis:



Tabel 2.14 Isu Strategis DP3AP2KB

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN STRATEGIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kurang optimalnya peran kelembagaan PUG dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Denpasar	Keterlibatan Masyarakat masih rendah	Masih terdapatnya kasus perdagangan perempuan (TPPO)	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan baik di ranah privat dan ranah publik	Masih terdapat ketimpangan peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Menurunnya indeks ketimpangan gender
	Belum optimalnya partisipasi anak dalam Pembangunan (partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan)	Keterkaitan antar sektor	Masih adanya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak yang memerlukan perlindungan khusus seperti anak korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum (ABH), pekerja anak, anak dengan disabilitas, anak korban NAPZA, anak dengan HIV/AIDS	Masih terjadinya kasus kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual, fisik, psikis di ranah privat dan publik serta penelantaran	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan kekerasan yang dialami	Meningkatnya Indeks Perlindungan Anak



Pemerintah Kota Denpasar

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka TFR masih rendah	Tata ruang wilayah	Persebaran penduduk tidak merata, Perubahan iklim dan keamanan pangan, bonus demografi	Pertumbuhan penduduk tinggi dan persebaran tidak merata	Angka kelahiran total dibawah ideal	Meningkatkan TFR
	Belum Optimalnya pemanfaatan Poktan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kualitas Lingkungan	Tantangan dalam menjaga keharmonisan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di tengah arus perubahan sosial, teknologi dan ekonomi yang cepat	Terdapat kecenderungan peserta KB lebih memilih metode KB non-MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) seperti suntikan, dibandingkan dengan MKJP seperti AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim). Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian populasi dalam jangka panjang.	Belum Optimalnya pemanfaatan Poktan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Meningkatnya Keluarga Berkualitas



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP3AP2KB

Tujuan dan sasaran menengah DP3AP2KB mengacu pada Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 yaitu “KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU”, yang menekankan wawasan budaya sesuai dengan Visi RPJPD Denpasar tahun 2025-2045 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No 7 Tahun 2024 yang berbunyi “Terwujudnya Kota Denpasar yang Berbudaya, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

Visi pembangunan daerah yang terpilih untuk Kota Denpasar mencerminkan cita-cita yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Visi pembangunan Kota Denpasar tersebut adalah: "TERWUJUDNYA KOTA DENPASAR YANG BERBUDAYA, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN" Visi "Terwujudnya Kota Denpasar yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan" bukan hanya sekadar aspirasi lokal, tetapi juga menjadi bagian integral dari kerangka perencanaan jangka panjang yang akan menjadi pegangan dalam pertumbuhan dan pembangunan Kota Denpasar menuju masa depan yang lebih baik.

Denpasar sebagai Kota Sejahtera dimaknai sebagai kota yang mampu menciptakan ruang yang damai dan terlepas dari segala gangguan, makmur, dan terpenuhi segala hak serta kewajiban masyarakatnya. Dalam visi ini, Kota Denpasar diharapkan dapat menjadi tempat yang damai secara lahir dan batin karena kesejahteraan individu terpenuhi. Kesejahteraan individu ini dapat tercapai melalui terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana dan terlayannya masyarakat dalam hal pendidikan,



kependudukan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja dan perekonomian, kesehatan dan gizi, kondisi lingkungan dan tempat tinggal, serta kondisi sosial lainnya yang dapat mengukur tingkat kualitas hidup. Kesejahteraan yang diharapkan dapat tercapai di Kota Denpasar adalah kesejahteraan yang berbasis individu dan dapat mendorong terciptanya kesejahteraan keluarga hingga lingkungan lebih luas untuk menciptakan penguatan sosial. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang mampu menikmati kemakmuran secara utuh, mampu merasakan berbagai fasilitas kesehatan, berbagai fasilitas pendidikan, berbagai fasilitas ekonomi, sosial dan budaya, serta mampu mengimplementasikan kesetaraan gender. Dalam kata Sejahtera juga terkandung makna tenteram, senang dan sentosa. Manifestasi sejahtera ini diharapkan dapat membentuk kualitas hidup yang lebih baik bagi setiap masyarakat yang tinggal. Perencanaan jangka panjang yang akan menjadi pegangan dalam pertumbuhan dan pembangunan Kota Denpasar menuju masa depan yang lebih baik.

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2025-2029, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No.7 Tahun 2024 tentang RPJPD yang mensyaratkan focus RPJMD periode 2025-2029 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Sesuai dengan arah RPJPD, fokus RPJMD periode Tahun 2025-2029 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2025-2029 disusun misi antara lain:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan
2. Menjaga Stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana



3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana,
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali,

Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2025-2029, dengan misi RPJPD yang diatur dalam Perda Kota Denpasar No.7 Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan
2. Menjaga Stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana bertujuan Meningkatkan pengendalian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, ketahanan pangan dan meningkatkan sesiapsiagaan bencana
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) bertujuan optimalisasi pelayanan publik
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana, bertujuan mewujudkan SDM yang unggul,



mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, mewujudkan keseimbangan pembangunan

5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali, bertujuan Meningkatkan penguatan jati diri masyarakat serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar mendukung pencapaian **misi ke-1 “Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan”**. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar diuraikan sebagai berikut.

Tujuan :

Meningkatkan Kualitas Kesehatan Melalui Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Kualitas Keluarga dan Penduduk Tumbuh Seimbang.



Sasaran :

- 1) Menurunnya Indeks Ketimpangan Gender
- 2) Meningkatnya Indeks Perlindungan Anak
- 3) Meningkatnya Angka Kelahiran / Total Fertility rate (TFR)
- 4) Meningkatnya Keluarga Berkualitas

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran di sajikan pada tabel. 3.1 berikut ini.



TABEL 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra DP3AP2KB

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
Meningkatnya kualitas kesehatan	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Melalui Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Kualitas Keluarga, dan Penduduk Tumbuh Seimbang.	Menurunnya indeks ketimpangan gender	Indeks Ketimpangan Gender (%)	0,200	0,198	0,196	0,194	0,192	0,190	0,190	
		Meningkatnya Indeks Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	72,56	73,76	74,96	76,16	77,36	78,56	79,76	
		Meningkatnya Angka Kelahiran / Total Fertility rate (TFR)	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) (%)	1,87	1,88	1,9	1,91	1,93	1,94	1,95	
		Meningkatnya Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	68.63	69.2: 70.2	70.2: 71.2	71.2: 72.1	72.1: 73	73: 73.9	68.63: 63.63	



Penahapan Renstra (Rencana Strategis) adalah tahapan bertahap yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam periode tertentu (biasanya 5 tahun), melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang sistematis, terukur, dan terarah. Penahapan Renstra DP3AP2KB Kota Denpasar 2025-2029 digunakan untuk mengarahkan kegiatan menuju desa cepat berkembang yang berkelanjutan. Berikut adalah penahapan Renstra DP3AP2KB Kota Denpasar.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
1	2	3	4	5
Konsolidasi dan Penguatan Dasar	Akselerasi Pelayanan dan Pemberdayaan	Integrasi dan Replikasi Inovasi	Optimalisasi dan Keberlanjutan	Exit Strategy dan Transisi
Pemetaan dan kondisi masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penguatan Layanan Publik Responsif Gender	Akseibilitas layanan publik responsif gender	Konsolidasi capaian dan reformasi strategi	Meningkatnya kualitas kesehatan melalui kesetaraan gender, Pemenuhan Hak Anak, Kualitas Keluarga
Pemetaan dan kondisi masalah pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Penguatan SDM layanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	Penguatan akses pendataan keluarga dan layanan KB	Revitalisasi program tidak efektif	Meningkatnya kualitas kesehatan melalui pembangunan Keluarga Berkualitas serta Penduduk Tumbuh Seimbang



3.2 Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

VISI : KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU			
Misi : Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Melalui, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Kualitas Keluarga dan Penduduk Tumbuh Seimbang	Menurunnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Meningkatkan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan Kapasitas Angkatan Kerja Perempuan, Peningkatan Peran Aktif Perempuan dalam Pembangunan (sosial, politik, hukum dan ekonomi), Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
		Meningkatkan Kualitas Keluarga	Peningkatan Pembelajaran Keluarga yang Berperspektif Gender
		Meningkatkan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Optimalisasi Pemanfaatan Data Gender dan Anak
		Menurunkan tingkat kekerasan perempuan	Meningkatkan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, Optimalisasi Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan, Meningkatkan kompetensi SDM Penyedia Layanan Penanganan Kekerasan Perempuan
	Meningkatnya Indeks Perlindungan	Menurunkan tingkat kekerasan terhadap Anak	Meningkatkan pencegahan kekerasan terhadap anak, Optimalisasi Layanan Pengaduan Kekerasan anak, Meningkatkan kompetensi



	Anak (IPA)		SDM Penyedia Layanan Penanganan Kekerasan anak,
		Peningkatan Layanan Pemenuhan Hak Anak	Pengembangan Layanan Puspaga
	Meningkatnya Angka kelahirann total / TFR	Meningkatkan MUKP	Peningkatan pemahaman MUKP
		Proyeksi Jumlah penduduk di masa depan	Penguatan sistem data dan informasi kependudukan
	Meningkatnya Keluarga Berkualitas	Menurunkan jumlah peserta KB yang tidak terlayani,	Peningkatan akses layanan kontrasepsi dan perluasan jangkauan pelayanan KB
		Meningkatkan Kersertaan Ber-KB	Jaminan ketersediaan alat kontrasepsi
		Menurunkan angka stunting	Optimalisasi Pokja TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting)



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penyusunan strategi dan arah kebijakan diupayakan mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ini. Relevansi strategi dan arah kebijakan dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Menurunnya IKG merupakan indikator keberhasilan dari implementasi PUG dan pemberdayaan perempuan. Meningkatkan kualitas dan cakupan program PUG dan PP akan mempercepat pencapaian kesetaraan gender secara struktural dan sistemik.
2. Menurunnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) juga sangat berkaitan erat dengan strategi peningkatan kualitas keluarga, karena keluarga merupakan unit dasar masyarakat yang membentuk nilai, perilaku, dan akses terhadap peluang bagi laki-laki dan perempuan sejak dini. Strategi peningkatan kualitas keluarga yang berbasis kesetaraan gender akan Memberdayakan perempuan sejak dalam rumah tangga, mengurangi kesenjangan dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan IKG. Dengan kata lain, keluarga yang berkualitas dan setara adalah fondasi utama menuju masyarakat yang lebih adil gender.
3. Meningkatkan penyelenggaraan dan pengelolaan sistem data gender dan anak adalah prasyarat penting untuk memahami secara detail dan komprehensif ketimpangan gender. Dengan sistem data yang baik, upaya menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) bisa dilakukan dengan lebih terarah, efisien, dan berdampak nyata.
4. Menurunnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator kemajuan dalam kesetaraan gender yang secara



langsung dan tidak langsung dapat menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dengan memperkuat posisi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, serta mengubah norma sosial dan kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan.

5. Meningkatnya Indeks Perlindungan Anak (IPA) menunjukkan bahwa suatu wilayah semakin mampu menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak. Hal ini secara langsung berkontribusi pada penurunan tingkat kekerasan terhadap anak, karena anak-anak terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.
6. Meningkatnya Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan hasil dari peningkatan layanan yang efektif dan responsif dalam pemenuhan hak anak. Sebaliknya, peningkatan kualitas dan akses layanan pemenuhan hak anak akan terus mendorong kenaikan IPA sebagai indikator keberhasilan perlindungan anak secara menyeluruh.
7. Meningkatnya median usia kawin pertama biasanya berkorelasi dengan penurunan TFR, sedangkan median usia kawin pertama yang rendah cenderung mendorong meningkatnya TFR.
8. Meningkatnya TFR berkontribusi langsung pada percepatan pertumbuhan jumlah penduduk di masa depan, sehingga menjadi faktor kunci dalam perencanaan demografi dan pembangunan nasional. Memahami hubungan ini penting agar kebijakan yang diambil mampu mengantisipasi tantangan dan memanfaatkan peluang dari dinamika penduduk.



9. Meningkatnya Ibangga menunjukkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi keluarga dalam program KB dan kesehatan reproduksi. Keluarga yang lebih sadar dan bangga dengan perannya cenderung aktif mencari layanan KB dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Hal ini akan mengurangi jumlah pasangan usia subur yang tidak terlayani karena mereka lebih proaktif dalam mengikuti program KB.
10. Peningkatan keluarga berkualitas dilaksanakan dengan meningkatkan kersertaan ber-KB. Hal ini karena keluarga yang bangga dan sadar perannya cenderung lebih aktif dan konsisten mengikuti program KB demi kualitas hidup yang lebih baik.
11. Strategi meningkatkan Ibangga secara efektif berkontribusi dalam menurunkan angka stunting, karena dengan meningkatnya kesadaran dan kepedulian keluarga, pola asuh dan pemenuhan gizi anak menjadi lebih optimal



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program kegiatan adalah rencana tertulis yang merinci serangkaian tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Program kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu tujuan dan sasaran, yang berisi langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mewujudkannya. Rencana dan program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Denpasar adalah sebagai berikut.

Matrik Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Dana Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar sebelum dan setelah perubahan tercantum dalam Tabel 4.1 dan 4.2.



TABEL 4.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
- Meningkatkan kualitas kesehatan	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Melalui Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Kualitas Keluarga, dan Penduduk Tumbuh Seimbang.				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
		Menurunnya indeks ketimpangan gender			Indeks Ketimpangan Gender (%)		
			Tercapainya Persentase Anggaran Responsif Gender		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Anak		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	



					jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
					Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	2.08.02.2.02.0005 - Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	



					jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.02.0006 - Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2.08.02.2.02.0007 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)	2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2.08.02.2.03.0009 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	



					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



					jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan)	2.08.03.2.03.0006 - Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	2.08.03.2.03.0009 - Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Tercapainya Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang Berspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar		Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang Berspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar (%)	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Cakupan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	2.08.04.2.01.0005 - Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas,	2.08.04.2.01.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	



					ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)		
				Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Cakupan Penyedia Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya di kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.2.03.0003 - layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	



			Meningkatkan Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan kebijakan		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan kebijakan (%)	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				Cakupan Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen)	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
					Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	
					Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen)	2.08.05.2.01.0005 - Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	
		Meningkatnya Indeks Perlindungan Anak			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)		
			Tercapainya Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	



					Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
					jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
				Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota



					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Tercapainya Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Jumlah Dokumen Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	



				Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
				jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	
				Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.07.2.03.0012 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.07.2.03.0014 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Angka Kelahiran / Total Fertility rate (TFR)		Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) (%)		
			Meningkatnya ASFR 15-19 tahun	ASFR 15-19 tahun (%)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	



				Cakupan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Kabupaten/Kota)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	



				penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah)	
				Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
				Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	2.14.02.2.01.0016 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
				Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	2.14.02.2.01.0017 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
				Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana
				Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
				Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal
				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	2.14.02.2.01.0028 - Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
				Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Kabupaten/Kota)	2.14.02.2.01.0029 - Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	2.14.02.2.01.0030 - Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
				Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen)	2.14.02.2.01.0032 - Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)
				Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01.0033 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
				Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam perencanaan pembangunan daerah	2.14.02.2.01.0034 - Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah



				penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah)	
			Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga



				Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen)	2.14.02.2.02.0010 - Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
				Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
				Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
				Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
				Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan)	2.14.02.2.02.0016 - Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	
				Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	
				Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	2.14.02.2.02.0022 - Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	
				Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	2.14.02.2.02.0023 - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	
				Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)	2.14.02.2.02.0024 - Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	
				Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen)	2.14.02.2.02.0025 - Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	
				Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	
				Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	2.14.02.2.02.0027 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
				Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)	2.14.02.2.02.0028 - Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
			Tercapainya Angka Pravelensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalanve Rate/ MPCR)	Angka Pravelensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalanve Rate/ MPCR) (Angka)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	



				KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		
				Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK	
				Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	2.14.03.2.01.0009 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
				Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	



					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
					Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	



				Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	
			Persentase peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya



					Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
					Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	2.14.03.2.03.0004 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	
					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)	2.14.03.2.03.0005 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang)	2.14.03.2.03.0007 - Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	2.14.03.2.03.0010 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
					Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesertaan KB Pria	
					Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang)	2.14.03.2.03.0015 - Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	
					Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)	2.14.03.2.03.0016 - Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	
					Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)	2.14.03.2.03.0017 - Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	
				Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



				Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
				Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04.0005 - Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atas Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
				Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
				Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
		Meningkatnya Keluarga Berkualitas		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	
			Tercapainya Persentase Keluarga yang Mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase Keluarga yang Mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
			Cakupan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga



					(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
					Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
					Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
					Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
					Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	2.14.04.2.01.0015 - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,



				Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)	2.14.04.2.01.0020 - Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	2.14.04.2.01.0023 - Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	
				Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)	2.14.04.2.01.0025 - Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	2.14.04.2.01.0027 - Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan	2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha	



					Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
					Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan)	2.14.04.2.01.0029 - Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	
				Cakupan Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	



Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				17.200.473.439,00		20.049.059.335,00		23.475.164.600,00		25.681.875.901,00		28.222.204.880,00
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.871.650.689,00		17.388.599.484,00		18.990.727.245,00		20.753.067.781,00		22.805.434.844,00
Tercapainya Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	15.871.650.689,00	100	17.388.599.484,00	100	18.990.727.245,00	100	20.753.067.781,00	100	22.805.434.844,00
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		14.250.000,00		14.655.000,00		15.100.500,00		18.881.100,00
Jumlah Dokumen Renja yang disusun , Jumlah Peserta Forum PD, Jumlah Laporan LKJIP yang disusun , LPPD LKPJ Evaluasi Renja,Managemen Risiko	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	0	0,00	7	14.250.000,00	7	14.655.000,00	7	15.100.500,00	21	18.881.100,00
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	0		4		4		4		12	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	0		3		3		3		9	



	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0		2		2		2		9	
2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		4.050.000,00		4.455.000,00		4.900.500,00		5.390.550,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	3	4.050.000,00	3	4.455.000,00	3	4.900.500,00	9	5.390.550,00
2.08.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00		5.390.550,00
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	2	2.100.000,00	2	2.100.000,00	2	2.100.000,00	9	5.390.550,00
2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		6.300.000,00		6.300.000,00		6.300.000,00		6.300.000,00
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	0	0,00	7	6.300.000,00	7	6.300.000,00	7	6.300.000,00	21	6.300.000,00
2.08.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				0,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	0	0,00	4	1.800.000,00	4	1.800.000,00	4	1.800.000,00	12	1.800.000,00
2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.568.454.042,00		12.809.364.484,00		13.987.028.845,00		14.135.936.581,00		15.121.639.974,00
Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	53	70	11.568.454.042,00	70	12.809.364.484,00	70	13.987.028.845,00	70	14.135.936.581,00	70	15.121.639.974,00



2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.568.454.042,00		12.809.364.484,00		13.987.028.845,00		14.135.936.581,00		15.121.639.974,00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	53	70	11.568.454.042,00	70	12.809.364.484,00	70	13.987.028.845,00	70	14.135.936.581,00	70	15.121.639.974,00
2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00
Jumlah PNS yang meningkat kompetensinya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0,00	18	60.000.000,00	19	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00
2.08.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0,00	18	60.000.000,00	19	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				536.657.300,00		612.100.000,00		1.013.805.000,00		1.245.150.500,00		1.369.665.550,00
Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	536.657.300,00	12	612.100.000,00	12	1.013.805.000,00	12	1.245.150.500,00	12	1.369.665.550,00
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0		12		12		12		12	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2	



2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	0,00	12	15.000.000,00	12	16.500.000,00	12	18.150.000,00	12	19.965.000,00
2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				325.058.000,00		310.000.000,00		468.700.000,00		645.535.000,00		710.088.500,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	325.058.000,00	12	310.000.000,00	12	468.700.000,00	12	645.535.000,00	12	710.088.500,00
2.08.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				19.432.000,00		23.100.000,00		25.410.000,00		27.951.000,00		30.746.100,00
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	19.432.000,00	2	23.100.000,00	2	25.410.000,00	2	27.951.000,00	2	30.746.100,00
2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0,00		25.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	12	25.000.000,00	12	55.000.000,00	12	60.500.000,00	12	66.550.000,00
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				69.747.300,00		44.000.000,00		48.400.000,00		53.240.000,00		58.564.000,00
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	69.747.300,00	12	44.000.000,00	12	48.400.000,00	12	53.240.000,00	12	58.564.000,00
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				122.420.000,00		195.000.000,00		399.795.000,00		439.774.500,00		483.751.950,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	122.420.000,00	12	195.000.000,00	12	399.795.000,00	12	439.774.500,00	12	483.751.950,00
2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				952.263.000,00		787.000.000,00		414.700.000,00		456.170.000,00		501.787.000,00



Cakupan Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	952.263.000,00	0	787.000.000,00	0	414.700.000,00		456.170.000,00	0	501.787.000,00
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		2		2		2		2	
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0			15		20		20		20	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		0		0		0		0	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	4		4		4		4		4	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	29		15		64		30		35	
2.08.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00
2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		55.000.000,00		104.500.000,00		114.950.000,00		126.445.000,00
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	2	55.000.000,00	2	104.500.000,00	2	114.950.000,00	2	126.445.000,00
2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				324.225.000,00		120.000.000,00		132.000.000,00		145.200.000,00		159.720.000,00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	29	324.225.000,00	15	120.000.000,00	64	132.000.000,00	30	145.200.000,00	35	159.720.000,00
2.08.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0,00		77.000.000,00		84.700.000,00		93.170.000,00		102.487.000,00
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0,00	15	77.000.000,00	20	84.700.000,00	20	93.170.000,00	20	102.487.000,00



2.08.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0,00		35.000.000,00		38.500.000,00		42.350.000,00		46.585.000,00
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	35.000.000,00	1	38.500.000,00	1	42.350.000,00	1	46.585.000,00
2.08.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				628.038.000,00		450.000.000,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	628.038.000,00	0	450.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	4	0,00	4	50.000.000,00	4	55.000.000,00	4	60.500.000,00	4	66.550.000,00
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.113.283.500,00		2.122.734.000,00		2.314.872.400,00		3.415.000.000,00		4.175.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jumlah Jasa yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.113.283.500,00	12	2.122.734.000,00	12	2.314.872.400,00	12	3.415.000.000,00	12	4.175.000.000,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12			
2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00



Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0,00	12	25.000.000,00	12	27.500.000,00	12	30.250.000,00	12	33.275.000,00
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				132.000.000,00		169.884.000,00		186.872.400,00		205.559.640,00		226.115.604,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	132.000.000,00	12	169.884.000,00	12	186.872.400,00	12	205.559.640,00	12	226.115.604,00
2.08.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		17.850.000,00		87.500.000,00		505.598.500,00		556.158.350,00
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0,00	12	17.850.000,00	12	87.500.000,00	12	505.598.500,00	12	556.158.350,00
2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				981.283.500,00		1.910.000.000,00		2.013.000.000,00		2.673.591.860,00		3.359.451.046,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	981.283.500,00	12	1.910.000.000,00	12	2.013.000.000,00	12	2.673.591.860,00	12	3.359.451.046,00
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.700.992.847,00		983.151.000,00		1.185.666.000,00		1.425.710.200,00		1.558.461.220,00
Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	1.700.992.847,00	3	983.151.000,00	3	1.185.666.000,00	4	1.425.710.200,00	4	1.558.461.220,00
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	76	76		76		76		76			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1			



	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2	2		5		7		7		7	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	101		105		110		112		115	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	15		15		15		15		15	
2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.000.000,00		58.201.000,00		58.201.000,00		58.201.000,00		64.201.100,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	30.000.000,00	1	58.201.000,00	1	58.201.000,00	1	58.201.000,00	1	64.201.100,00
2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				580.080.000,00		620.000.000,00		675.000.000,00		887.559.200,00		976.315.120,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	76	76	580.080.000,00	76	620.000.000,00	76	675.000.000,00	76	887.559.200,00	76	976.315.120,00
2.08.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				24.994.000,00		45.000.000,00		96.750.000,00		45.000.000,00		49.500.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2	2	24.994.000,00	5	45.000.000,00	7	96.750.000,00	7	45.000.000,00	7	49.500.000,00
2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				86.116.000,00		45.000.000,00		96.800.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00



Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	101	86.116.000,00	105	45.000.000,00	110	96.800.000,00	112	220.000.000,00	115	242.000.000,00
2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				887.892.847,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	887.892.847,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00
2.08.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		14.950.000,00		58.915.000,00		14.950.000,00		26.445.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	0,00	1	14.950.000,00	1	58.915.000,00	1	14.950.000,00	1	26.445.000,00
2.08.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				91.910.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	15	91.910.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				149.394.000,00		440.172.667,00		1.352.100.833,00		1.487.310.917,00		1.636.042.008,00
Tercapainya Persentase Anggaran Responsif Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	23,05	23,95	149.394.000,00	24,00	440.172.667,00	24,05	1.352.100.833,00	24,15	1.487.310.917,00	24,55	1.636.042.008,00



	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	0	1		1		1		1		1	
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				59.493.000,00		179.842.300,00		329.275.833,00		358.385.183,00		388.603.701,00
Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Anak	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0	59.493.000,00	36	179.842.300,00	36	329.275.833,00	36	358.385.183,00	36	388.603.701,00
	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	0		0		0					
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		1		1					
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	0	0		2		2					
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	37		37		37					
2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				0,00		55.000.000,00		87.689.303,00		97.500.000,00		101.200.000,00
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	1	55.000.000,00	1	87.689.303,00	1	97.500.000,00	1	101.200.000,00
2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG				0,00		33.000.000,00		79.800.000,00		89.800.000,00		93.100.000,00



Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	0	0	0,00	2	33.000.000,00	2	79.800.000,00	2	89.800.000,00	2	93.100.000,00
2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		26.400.000,00		89.800.000,00		91.900.000,00		105.200.000,00
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0	0,00	36	26.400.000,00	36	89.800.000,00	36	91.900.000,00	36	105.200.000,00
2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				59.493.000,00		65.442.300,00		71.986.530,00		79.185.183,00		89.103.701,00
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	37	59.493.000,00	37	65.442.300,00	37	71.986.530,00	37	79.185.183,00	37	89.103.701,00
2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				89.901.000,00		260.330.367,00		710.125.000,00		773.825.734,00		871.008.307,00



Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	0	0	89.901.000,00	13	260.330.367,00	13	710.125.000,00	13	773.825.734,00	13	871.008.307,00
	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0		0		10		10		10	
	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)						35		40		45	
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	0	0		0		13		13		13	
	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	7	0		4		4		4		4	
2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				0,00		50.000.000,00		121.200.000,00		132.300.000,00		165.913.307,00



Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	0	0	0,00	13	50.000.000,00	13	121.200.000,00	13	132.300.000,00	13	165.913.307,00
2.08.02.2.02.0005 - Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		75.200.000,00		89.100.000,00		91.500.000,00
Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	0	0	0,00	0	0,00	13	75.200.000,00	13	89.100.000,00	13	91.500.000,00
2.08.02.2.02.0006 - Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		97.400.000,00		98.200.000,00		107.200.000,00
Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0	0,00	0	0,00	10	97.400.000,00	10	98.200.000,00	10	107.200.000,00
2.08.02.2.02.0007 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		120.000.000,00		132.000.000,00		145.200.000,00		159.720.000,00
Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	0	0	0,00	1	120.000.000,00	1	132.000.000,00	1	145.200.000,00	1	159.720.000,00
2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,				89.901.000,00		90.330.367,00		219.325.000,00		220.025.734,00		255.300.000,00



Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota												
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	7	0	89.901.000,00	4	90.330.367,00	4	219.325.000,00	4	220.025.734,00	4	255.300.000,00
2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		65.000.000,00		89.000.000,00		91.375.000,00
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)			0,00		0,00	35	65.000.000,00	40	89.000.000,00	45	91.375.000,00
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		312.700.000,00		355.100.000,00		376.430.000,00
Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)			0,00		0,00	1	312.700.000,00	1	355.100.000,00	1	376.430.000,00
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)						1		1		1	
	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)						4		5		8	



2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		75.200.000,00		98.100.000,00		101.355.000,00
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)			0,00		0,00	4	75.200.000,00	5	98.100.000,00	8	101.355.000,00
2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		165.000.000,00		167.800.000,00		182.500.000,00
terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)			0,00		0,00	1	165.000.000,00	1	167.800.000,00	1	182.500.000,00
2.08.02.2.03.0009 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		72.500.000,00		89.200.000,00		92.575.000,00
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)			0,00		0,00	1	72.500.000,00	1	89.200.000,00	1	92.575.000,00
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				181.309.000,00		817.219.020,00		898.940.922,00		988.835.014,00		1.087.718.516,00



Meningkatnya Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	181.309.000,00	100	817.219.020,00	100	898.940.922,00	100	988.835.014,00	100	1.087.718.516,00
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				62.530.000,00		144.173.000,00		158.590.300,00		174.449.330,00		191.894.263,00
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	0	0	62.530.000,00	12	144.173.000,00	12	158.590.300,00	12	174.449.330,00	12	191.894.263,00
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	4	4		4		4		4		4	
2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		70.000.000,00		77.000.000,00		84.700.000,00		93.170.000,00
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	0	0	0,00	12	70.000.000,00	12	77.000.000,00	12	84.700.000,00	12	93.170.000,00
2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				62.530.000,00		74.173.000,00		81.590.300,00		89.749.330,00		98.724.263,00



Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	4	4	62.530.000,00	4	74.173.000,00	4	81.590.300,00	4	89.749.330,00	4	98.724.263,00
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				93.966.000,00		325.533.720,00		358.087.092,00		393.895.801,00		433.285.382,00
Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	100	93.966.000,00	100	325.533.720,00	100	358.087.092,00	100	393.895.801,00	100	433.285.382,00
	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	0		200		200		200		200	
	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	0		45		45		45		45	



	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		0		0		0	
2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&				0,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00
&Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	0	15.000.000,00	0	20.000.000,00	0	25.000.000,00	0	30.000.000,00
2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00
Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	0	5.000.000,00	0	10.000.000,00	0	15.000.000,00	0	20.000.000,00
2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	0	0,00	200	30.000.000,00	200	35.000.000,00	200	40.000.000,00	200	45.000.000,00



2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	0	35.000.000,00	0	40.000.000,00	0	45.000.000,00	0	50.000.000,00
2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00
Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	0	0,00	0	20.000.000,00	0	25.000.000,00	0	30.000.000,00	0	35.000.000,00
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		117.171.120,00		114.388.232,00		113.827.055,00		115.709.761,00
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	0	0,00	45	117.171.120,00	45	114.388.232,00	45	113.827.055,00	45	115.709.761,00
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				93.966.000,00		103.362.600,00		113.698.860,00		125.068.746,00		137.575.621,00
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	100	93.966.000,00	100	103.362.600,00	100	113.698.860,00	100	125.068.746,00	100	137.575.621,00
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan				24.813.000,00		347.512.300,00		382.263.530,00		420.489.883,00		462.538.871,00



Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	0	0	24.813.000,00	1	347.512.300,00	1	382.263.530,00	1	420.489.883,00	1	462.538.871,00
	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	0	35		35		35		35		35	
	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan)	0	0		1		1		1		1	
	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	0	0		35		35		40		45	
	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	0		36		36		36		36	
2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		70.000.000,00		77.000.000,00		84.700.000,00		93.170.000,00
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga	0	0	0,00	36	70.000.000,00	36	77.000.000,00	36	84.700.000,00	36	93.170.000,00



	pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)											
2.08.03.2.03.0006 - Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan provinsi (Laporan)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00
2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		70.000.000,00		77.000.000,00		84.700.000,00		93.170.000,00
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)	0	0	0,00	35	70.000.000,00	35	77.000.000,00	40	84.700.000,00	45	93.170.000,00
2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				24.813.000,00		36.512.300,00		40.163.530,00		44.179.883,00		48.597.871,00
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	0	35	24.813.000,00	35	36.512.300,00	35	40.163.530,00	35	44.179.883,00	35	48.597.871,00



2.08.03.2.03.0009 - Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		161.051.000,00
Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	0	0	0,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00	1	161.051.000,00
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				32.611.000,00		70.151.062,00		771.661.680,00		848.827.848,00		933.710.633,00
Tercapainya Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang Berspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang Berspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar (%)	6,90	6,90	32.611.000,00	6,90	70.151.062,00	9,30	771.661.680,00	9,30	848.827.848,00	9,30	933.710.633,00
2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		25.000.000,00		180.500.000,00		189.500.000,00		195.250.000,00
Cakupan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	180.500.000,00	1	189.500.000,00	1	195.250.000,00



	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)											
2.08.04.2.01.0005 - Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0
Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)			0		0		0		0		0
2.08.04.2.01.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		25.000.000,00		180.500.000,00		189.500.000,00		195.250.000,00
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	180.500.000,00	1	189.500.000,00	1	195.250.000,00
2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang				32.611.000,00		45.151.062,00		525.821.680,00		587.453.848,00		642.500.000,00



Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	0	36	32.611.000,00	36	45.151.062,00	36	525.821.680,00	36	587.453.848,00	36	642.500.000,00
	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	0		2		2		2		2	
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	0		4		4		4		4	
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0		36		36		36		36	
2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		76.252.370,00		89.200.000,00		92.700.000,00
Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0	0,00	36	0,00	36	76.252.370,00	36	89.200.000,00	36	92.700.000,00



2.08.04.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		25.000.000,00		149.610.000,00		251.103.848,00		273.900.000,00
Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	0	0,00	2	25.000.000,00	2	149.610.000,00	2	251.103.848,00	2	273.900.000,00
2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				32.611.000,00		20.151.062,00		139.459.310,00		59.500.000,00		79.200.000,00
Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	0	36	32.611.000,00	36	20.151.062,00	36	139.459.310,00	36	59.500.000,00	36	79.200.000,00
2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		160.500.000,00		187.650.000,00		196.700.000,00
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	0	0,00	4	0,00	4	160.500.000,00	4	187.650.000,00	4	196.700.000,00
2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		65.340.000,00		71.874.000,00		95.960.633,00



Cakupan Penyedia Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya di kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	200	0,00	200	65.340.000,00	200	71.874.000,00	200	95.960.633,00
2.08.04.2.03.0003 - layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota				0,00		0,00		65.340.000,00		71.874.000,00		95.960.633,00
Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	200	0,00	200	65.340.000,00	200	71.874.000,00	200	95.960.633,00
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				62.335.000,00		335.250.823,00		368.775.916,00		405.653.508,00		446.218.858,00
Meningkatkan Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan kebijakan	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan kebijakan (%)	30	30	62.335.000,00	50	335.250.823,00	60	368.775.916,00	75	405.653.508,00	75	446.218.858,00
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				62.335.000,00		335.250.823,00		368.775.916,00		405.653.508,00		446.218.858,00
Cakupan Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	0	3	62.335.000,00	3	335.250.823,00	4	368.775.916,00	4	405.653.508,00	4	446.218.858,00
	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	0	0		1		1		1		1	



	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen)	0	0		1		1		1		1	
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				62.335.000,00		68.568.000,00		75.425.350,00		82.967.885,00		91.264.674,00
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	0	3	62.335.000,00	3	68.568.000,00	4	75.425.350,00	4	82.967.885,00	4	91.264.674,00
2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak				0,00		209.482.823,00		230.450.566,00		253.485.623,00		278.854.184,00
Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	0	0	0,00	1	209.482.823,00	1	230.450.566,00	1	253.485.623,00	1	278.854.184,00
2.08.05.2.01.0005 - Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA				0,00		57.200.000,00		62.900.000,00		69.200.000,00		76.100.000,00
Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen)	0	0	0,00	1	57.200.000,00	1	62.900.000,00	1	69.200.000,00	1	76.100.000,00
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				759.424.500,00		756.082.124,00		831.691.225,00		914.860.347,00		1.006.346.382,00



Tercapainya Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	800	800	759.424.500,00	900	756.082.124,00	900	831.691.225,00	1.000	914.860.347,00	1.000	1.006.346.382,00
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				18.400.000,00		20.240.000,00		22.264.000,00		24.490.400,00		26.939.440,00
Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	0	18.400.000,00	0	20.240.000,00	0	22.264.000,00	0	24.490.400,00	0	26.939.440,00
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	13	13		14		14		15		15	



	Kabupaten/Kota (Lembaga)											
2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				18.400.000,00		20.240.000,00		22.264.000,00		24.490.400,00		26.939.440,00
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	13	13	18.400.000,00	14	20.240.000,00	14	22.264.000,00	15	24.490.400,00	15	26.939.440,00
2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				741.024.500,00		735.842.124,00		809.427.225,00		890.369.947,00		979.406.942,00
Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	4	4	741.024.500,00	4	735.842.124,00	4	809.427.225,00	4	890.369.947,00	4	979.406.942,00
	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0		0		0		0		0	
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	0		0		0		0		0	



	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	6		6		7		8		8	
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0		0		0		0		0	
2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				137.971.000,00		185.868.100,00		204.454.910,00		224.900.401,00		247.390.441,00
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	6	137.971.000,00	6	185.868.100,00	7	204.454.910,00	8	224.900.401,00	8	247.390.441,00
2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				508.678.500,00		549.974.024,00		604.972.315,00		665.469.546,00		732.016.501,00



Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	4	4	508.678.500,00	4	549.974.024,00	4	604.972.315,00	4	665.469.546,00	4	732.016.501,00
2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				94.375.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0	94.375.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				143.749.250,00		241.584.155,00		261.266.779,00		283.320.486,00		306.733.639,00



Tercapainya Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	143.749.250,00	100	241.584.155,00	100	261.266.779,00	100	283.320.486,00	100	306.733.639,00
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				34.325.000,00		57.757.500,00		62.333.250,00		75.550.865,00		79.755.233,00
Jumlah Dokumen Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	0	0	34.325.000,00	1	57.757.500,00	1	62.333.250,00	1	75.550.865,00	1	79.755.233,00
	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	0	2		2		2		2			
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	0	0		0		0		0			
2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				34.325.000,00		37.757.500,00		41.533.250,00		50.550.865,00		52.255.233,00
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	0	2	34.325.000,00	2	37.757.500,00	2	41.533.250,00	2	50.550.865,00	2	52.255.233,00



2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		20.000.000,00		20.800.000,00		25.000.000,00		27.500.000,00
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.800.000,00	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				93.591.000,00		102.950.100,00		109.245.110,00		114.569.621,00		128.375.000,00
Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Derah Kabupaten / Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	93.591.000,00	100	102.950.100,00	100	109.245.110,00	100	114.569.621,00	100	128.375.000,00
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		0		0		0		0	
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				93.591.000,00		102.950.100,00		109.245.110,00		114.569.621,00		128.375.000,00



Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	93.591.000,00	100	102.950.100,00	100	109.245.110,00	100	114.569.621,00	100	128.375.000,00
2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				15.833.250,00		80.876.555,00		89.688.419,00		93.200.000,00		98.603.406,00
Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	0	15.833.250,00	1	80.876.555,00	1	89.688.419,00	1	93.200.000,00	1	98.603.406,00
	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)		1		1		1		1		1	
	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan											



	pendampingan (Lembaga)											
	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	0	0		2		3		4		4	
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		0		0		0		0	
2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota				0,00		12.526.655,00		13.900.000,00		14.500.000,00		17.978.406,00
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	0	0	0,00	2	12.526.655,00	3	13.900.000,00	4	14.500.000,00	4	17.978.406,00
2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				15.833.250,00		47.500.000,00		50.500.000,00		51.200.000,00		52.325.000,00
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)		1	15.833.250,00	1	47.500.000,00	1	50.500.000,00	1	51.200.000,00	1	52.325.000,00
2.08.07.2.03.0012 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00



terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		20.849.900,00		25.288.419,00		27.500.000,00		28.300.000,00
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	0	0,00	1	20.849.900,00	1	25.288.419,00	1	27.500.000,00	1	28.300.000,00
2.08.07.2.03.0014 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)			0		0		0		0		0
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				511.674.950,00		7.007.821.645,00		7.491.138.194,00		7.890.057.478,00		8.169.922.334,00
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				26.025.000,00		479.148.000,00		482.062.800,00		485.269.080,00		488.795.988,00



Menurunnya ASFR 15-19 tahun	ASFR 15-19 tahun (%)	8,9	8,1	26.025.000,00	7,7	479.148.000,00	7,3	482.062.800,00	7	485.269.080,00	6,7	488.795.988,00
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
Cakupan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	1	1	0,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	13	13		13		13		13		13	
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	13	13		13		13		13		13	



	kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)										
	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah)										
	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen)										
	Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Kabupaten/Kota)										
	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23



	SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)											
	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)											
2.14.02.2.01.0016 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14.02.2.01.0017 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00



Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota												
2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	23	23	0,00	23	20.000.000,00	23	20.000.000,00	23	20.000.000,00	23	20.000.000,00
2.14.02.2.01.0028 - Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	13	13	0,00	13	0,00	13	0,00	13	0,00	13	0,00
2.14.02.2.01.0029 - Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0
Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan			0		0		0		0		0



	Kependudukan (Kabupaten/Kota)											
2.14.02.2.01.0030 - Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	13	13	0,00	13	0,00	13	0,00	13	0,00	13	0,00
2.14.02.2.01.0032 - Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)				0		0		0		0		0
Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen)			0		0		0		0		0
2.14.02.2.01.0033 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00



2.14.02.2.01.0034 - Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah)			0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				26.025.000,00		439.148.000,00		442.062.800,00		445.269.080,00		448.795.988,00
Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1	0	26.025.000,00	1	439.148.000,00	1	442.062.800,00	1	445.269.080,00	1	448.795.988,00
	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1	1		1		1		1			
	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen)	1	0		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen)	0	0		0		0		0			
	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana		0		1		1		1			



(Bangga Kencana) (Dokumen)											
Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)	1	0		1		1		1		1	
Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	0	0		0		0		0		0	
Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)		0		1		1		1		1	
Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	1	0		1		1		1		1	
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	0	0		0		0		0		0	
Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	0	0		12		12		12		12	
Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1	0		1		1		1		1	
Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan		0		1		1		1		1	



	Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)											
	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan)	0	0		1		1		1		1	
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	0	0	0,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00
2.14.02.2.02.0010 - Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00
Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen)	1	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00
2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				26.025.000,00		29.148.000,00		32.062.800,00		35.269.080,00		38.795.988,00
Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	1	1	26.025.000,00	1	29.148.000,00	1	32.062.800,00	1	35.269.080,00	1	38.795.988,00
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	1	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00



Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1	0	0,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00
2.14.02.2.02.0016 - Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota				0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
Terlaksananya Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan)	0	0	0,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00
2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14.02.2.02.0022 - Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan				0,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00
Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	1	0	0,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00
2.14.02.2.02.0023 - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



2.14.02.2.02.0024 - Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan				0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)	1	0	0,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00
2.14.02.2.02.0025 - Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)		0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
2.14.02.2.02.0027 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)		0	0,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00



profil Pengendalian Penduduk dan KB)												
2.14.02.2.02.0028 - Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)		0	0,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				214.374.000,00		2.390.270.100,00		2.488.266.960,00		2.596.063.505,00		2.714.639.706,00
Tercapainya Angka Pravelensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/ MPCR)	Angka Pravelensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/ MPCR) (Angka)	52,7	54,3	214.374.000,00	55,1	2.390.270.100,00	55,9	2.488.266.960,00	56,7	2.596.063.505,00	57,5	2.714.639.706,00
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				107.062.000,00		704.270.100,00		801.079.770,00		871.897.747,00		1.164.899.706,00
Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	3	3	107.062.000,00	3	704.270.100,00	3	801.079.770,00	3	871.897.747,00	3	1.164.899.706,00



	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	0	0		1	1		0	0	
	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	45	0		3	3		3	3	
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	0	0		1	1		1	1	
	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	4	4		4	4		4	4	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	0	0		5	5		5	5	
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBP (Laporan)	2	0		2	2		2	2	
2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBP				0,00		75.000.000,00		80.000.000,00	130.000.000,00	66.902.715,00



Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2	0	0,00	2	75.000.000,00	2	80.000.000,00	2	130.000.000,00	2	66.902.715,00
2.14.03.2.01.0009 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana				0,00		65.000.000,00		75.000.000,00		110.000.000,00		125.000.000,00
Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	45	0	0,00	3	65.000.000,00	3	75.000.000,00	3	110.000.000,00	3	125.000.000,00
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				0,00		253.339.400,00		275.000.000,00		315.000.000,00		616.000.000,00
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	0	0	0,00	5	253.339.400,00	5	275.000.000,00	5	315.000.000,00	5	616.000.000,00
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				29.400.000,00		67.400.000,00		67.400.000,00		67.400.000,00		68.769.469,00
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	3	3	29.400.000,00	3	67.400.000,00	3	67.400.000,00	3	67.400.000,00	3	68.769.469,00



2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				0,00		75.640.000,00		105.000.000,00		125.000.000,00		151.280.000,00
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	0	0	0,00	1	75.640.000,00	1	105.000.000,00	1	125.000.000,00	1	151.280.000,00
2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				77.662.000,00		102.890.700,00		113.179.770,00		124.497.747,00		136.947.522,00
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	4	4	77.662.000,00	4	102.890.700,00	4	113.179.770,00	4	124.497.747,00	4	136.947.522,00
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				0,00		65.000.000,00		85.500.000,00		0,00		0,00
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	0	0	0,00	1	65.000.000,00	1	85.500.000,00	0	0,00	0	0,00
2.14.03.2.02 - Pendencygunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				0,00		540.000.000,00		602.000.000,00		647.800.000,00		718.740.000,00



Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	0	0	0,00	0	540.000.000,00	0	602.000.000,00	0	647.800.000,00	0	718.740.000,00
	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	516	516		516		516		516		516	
	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	45	0		5		5		5		5	
	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	0	0		12		12		12		12	
2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB				0,00		240.000.000,00		255.000.000,00		275.000.000,00		319.440.000,00
Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	45	0	0,00	5	240.000.000,00	5	255.000.000,00	5	275.000.000,00	5	319.440.000,00
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				0,00		120.000.000,00		137.000.000,00		155.000.000,00		159.720.000,00
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	516	516	0,00	516	120.000.000,00	516	137.000.000,00	516	155.000.000,00	516	159.720.000,00
2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00



di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB												
Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14.03.2.02.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				0,00		180.000.000,00		210.000.000,00		217.800.000,00		239.580.000,00
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	0	0	0,00	12	180.000.000,00	12	210.000.000,00	12	217.800.000,00	12	239.580.000,00
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				107.312.000,00		946.000.000,00		955.500.000,00		1.076.365.758,00		831.000.000,00
Persentase peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)	0	0	107.312.000,00	1	946.000.000,00	1	955.500.000,00	1	1.076.365.758,00	1	831.000.000,00
	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	0	0		1		1		1		1	



Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	0	40	40	40	40	40	40
Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang)							
Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)							
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang)	0	0	200	200	200	200	200
Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	0	0	496	496	496	496	496
Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	0	0	12	12	12	12	12
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	0	0	30	30	30	30	30
Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	0	0	12	12	12	12	12



	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	0	0		15		15		15		15	
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				0,00		50.000.000,00		75.000.000,00		95.000.000,00		0,00
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	0	0	0,00	12	50.000.000,00	12	75.000.000,00	12	95.000.000,00	12	0,00
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				0,00		75.000.000,00		110.000.000,00		155.000.000,00		0,00
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	0	0	0,00	496	75.000.000,00	496	110.000.000,00	496	155.000.000,00	496	0,00
2.14.03.2.03.0004 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				0,00		37.000.000,00		55.000.000,00		85.000.000,00		65.000.000,00
Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan	0	0	0,00	1	37.000.000,00	1	55.000.000,00	1	85.000.000,00	1	65.000.000,00



dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)											
2.14.03.2.03.0005 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				0,00		90.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		66.000.000,00
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)	0	0	0,00	1	90.000.000,00	1	120.000.000,00	1	150.000.000,00	1	66.000.000,00
2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				0,00		75.000.000,00		95.000.000,00		135.000.000,00		120.000.000,00
Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	0	0	0,00	1	75.000.000,00	1	95.000.000,00	1	135.000.000,00	1	120.000.000,00
2.14.03.2.03.0007 - Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				0,00		0,00		0,00		0,00		55.000.000,00
Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang)	0	0	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	55.000.000,00
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				0,00		85.000.000,00		125.000.000,00		165.000.000,00		120.000.000,00
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	0	0	0,00	30	85.000.000,00	30	125.000.000,00	30	165.000.000,00	30	120.000.000,00
2.14.03.2.03.0010 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				107.312.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00



Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	0	40	107.312.000,00	40	165.000.000,00	40	165.000.000,00	40	165.000.000,00	40	165.000.000,00
2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				0,00		55.000.000,00		85.000.000,00		0,00		120.000.000,00
Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	0	0	0,00	12	55.000.000,00	12	85.000.000,00	12	0,00	12	120.000.000,00
2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesertaan KB Pria				0,00		93.500.000,00		125.500.000,00		126.365.758,00		120.000.000,00
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	0	0	0,00	15	93.500.000,00	15	125.500.000,00	15	126.365.758,00	15	120.000.000,00
2.14.03.2.03.0015 - Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				0,00		80.000.000,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang)			0,00		80.000.000,00		0,00		0,00		0,00
2.14.03.2.03.0016 - Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				0,00		65.000.000,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)			0,00		65.000.000,00		0,00		0,00		0,00
2.14.03.2.03.0017 - Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				0,00		75.500.000,00		0,00		0,00		0,00



Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)	0	0	0,00	0	75.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				0,00		200.000.000,00		129.687.190,00		0,00		0,00
Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	129.687.190,00	1	0,00	1	0,00
	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	0	0		0		0		0		0	
	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	0	0		27		27		27		27	
2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas				0,00		80.000.000,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	0	0	0,00	0	80.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di				0,00		120.000.000,00		129.687.190,00		0,00		0,00



Kampung Keluarga Berkualitas												
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	0	0	0,00	27	120.000.000,00	27	129.687.190,00	27	0,00	27	0,00
2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	0	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				271.275.950,00		4.138.403.545,00		4.520.808.434,00		4.808.724.893,00		4.966.486.640,00
Tercapainya Persentase Keluarga yang Mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase Keluarga yang Mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	16	16	271.275.950,00	16	4.138.403.545,00	16	4.520.808.434,00	16	4.808.724.893,00	16	4.966.486.640,00
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				271.275.950,00		833.603.545,00		1.196.408.434,00		1.403.900.000,00		1.513.000.000,00
Cakupan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	0	0	271.275.950,00	0	833.603.545,00	1	1.196.408.434,00	1	1.403.900.000,00	1	1.513.000.000,00
	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	0	0		0		0		0		0	



Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	0	0	20	20	20	20
Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)	0	0	0	0	0	0
Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan)		0	0	0	0	0
Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	0	0	0	0	0	0
Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	0	0	0	0	0	0
Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	0	0	1	1	1	1
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga	1	0	0	1	1	1



(Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)										
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	0	0		0	0		0	0	0	
Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	0	0		603	603		603	603	603	
Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	0	0		0	603		603	603	603	
Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	0	128		128	128		128	128	128	



	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	0	0		296		296		296		296	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	0	0		0		0		0		0	
2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14.04.2.01.0015 - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00



Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				0,00		217.850.000,00		235.000.000,00		248.500.000,00		248.500.000,00
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	0	0	0,00	20	217.850.000,00	20	235.000.000,00	20	248.500.000,00	20	248.500.000,00
2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				271.275.950,00		248.403.545,00		260.000.000,00		295.000.000,00		325.000.000,00



Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	0	128	271.275.950,00	128	248.403.545,00	128	260.000.000,00	128	295.000.000,00	128	325.000.000,00
2.14.04.2.01.0020 - Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0,00		195.000.000,00		245.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00
Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	0	0	0,00	1	195.000.000,00	1	245.000.000,00	1	275.000.000,00	1	300.000.000,00
2.14.04.2.01.0023 - Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



	Pembangunan Keluarga (Dokumen)											
2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0,00		72.350.000,00		245.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00
Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	0	0	0,00	296	72.350.000,00	296	245.000.000,00	296	260.000.000,00	296	260.000.000,00
2.14.04.2.01.0025 - Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				0,00		0,00		61.408.434,00		65.400.000,00		89.500.000,00
Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)	1	0	0,00	0	0,00	1	61.408.434,00	1	65.400.000,00	1	89.500.000,00
2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0,00		0,00		25.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00



Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	0	0	0,00	0	0,00	603	25.000.000,00	603	60.000.000,00	603	65.000.000,00
2.14.04.2.01.0027 - Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				0,00		0,00		25.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00
2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	0	0	0,00	603	100.000.000,00	603	100.000.000,00	603	100.000.000,00	603	100.000.000,00



2.14.04.2.01.0029 - Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				0,00		3.304.800.000,00		3.324.400.000,00		3.404.824.893,00		3.453.486.640,00
Cakupan Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	0	0	0,00	1	3.304.800.000,00	1	3.324.400.000,00	1	3.404.824.893,00	1	3.453.486.640,00
	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	0	0		1		1		1		1	
	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	0	0		1		1		1		1	



2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				0,00		25.000.000,00		29.000.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	29.000.000,00	1	65.000.000,00	1	75.000.000,00
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				0,00		3.239.400.000,00		3.239.400.000,00		3.239.400.000,00		3.239.400.000,00
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	0	0	0,00	1	3.239.400.000,00	1	3.239.400.000,00	1	3.239.400.000,00	1	3.239.400.000,00
2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				0,00		20.000.000,00		20.500.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00
Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	0	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.500.000,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00
2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga				0,00		20.400.000,00		35.500.000,00		70.424.893,00		99.086.640,00



Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	0	0	0,00	1	20.400.000,00	1	35.500.000,00	1	70.424.893,00	1	99.086.640,00
--	---	---	---	------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------



Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses Rancangan ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program kegiatan. Sejalan dengan Rancangan tersebut sesuai dengan paradigma yang berkembang setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah hendaknya bersifat transparan dan dapat diukur. Hal ini sesuai dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dimana salah satu dari sepuluh prinsip *good governance* adalah akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada publik. Berdasarkan pada hal tersebut, maka rencana kegiatan program kebijakan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam Renstra tingkat keberhasilan yang dicapai hendaknya dapat diukur, sehingga dengan demikian terjadi hubungan sangat erat antara perencanaan dengan pelaksanaan yang dalam hal ini tercermin dalam tingkat keberhasilannya. Dalam melakukan pengukuran kinerja terlebih dahulu disajikan dokumen Rencana Strategis yang merupakan rencana lima tahunan. Untuk mengukur Rencana Strategis tersebut dijabarkan ke dalam Renstra unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Sebelum pengukuran kinerja dilakukan beberapa komponen rencana kinerja yang perlu diperhatikan antara lain indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja suatu program dan kegiatan. Penentuan indikator kinerja serta pengukuran capaiannya ditetapkan dengan merujuk kepada strategi pembangunan jangka menengah yang ditetapkan.

Berikut diuraikan indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.



Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Base Line Tahun 2024	Target Kinerja Sasaran						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks IKG	0,200	0,198	0,196	0,194	0,192	0,190	0,190	
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks IPA	72,56	73,76	74,96	76,16	77,36	78,56	79,76	
3	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	1,87	1,88	1,9	1,91	1,93	1,94	1,95	
4	Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)	Indeks ibangga	68.63	69.2:70.2	70.2:71.2	71.2:72.1	72.1:73	73:73.9	73.9:74.7	

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci DP3AP2KB yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Skor Indikator Kabupaten Layak Anak	Predikat	KLA Tingkat Utama	KLA Tingkat Utama	KLA Tingkat Utama	KLA	KLA	KLA	KLA	
2	Calon pengantin yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	%	36,57	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	
3	Pelayanan keluarga berencana (KB) pascapersalinan dalam 42 hari pascapersalinan	%	80	95	100	100	100	100	100	
4	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	63,9	64,8	65,7	66,5	67,3	68,1	68,9	
5	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	Tahun	23	23,04	23,08	23,12	23,16	23,2	23,24	
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,96	0,91	0,88	0,83	0,79	0,75	0,71	
7	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	52,7	53,5	54,3	55,1	55,9	56,7	57,5	
8	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	15,8	15,4	15	14,6	14,2	13,8	13,4	
9	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	%	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	92,00	



10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,77	96,89	97,01	97,13	97,25	97,37	97,48	
11	ASFR 15-19 tahun	%	8,9	8,5	8,1	7,7	7,3	7	6,7	
12	Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh TPK	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	74,6	74,9	75,2	75,4	75,7	75,9	76,2	
14	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	72,8	73,43	74,06	74,69	75,32	75,95	76,58	
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	60,50	61,26	62,02	62,78	63,54	64,30	65,05	
16	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	53	53,56	54,12	54,68	55,24	55,8	56,36	
17	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	91,9	92,5	93,1	93,6	94,1	94,5	94,9	
18	Unmeetned	%	15,72	15,22	14,72	14,22	13,72	13,22	12,72	
19	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persentase	29,6	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	



BAB V

PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2025-2029 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2025-2029, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.



5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 19 September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Denpasar


Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 196603111995032001

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/643 /HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR
TAHUN 2025-2029

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi Perencanaan Pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar sesuai arah kebijakan serta visi dan misi Kepala Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahapan persiapan penyusunan rencana strategis diawali dengan Penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Denpasar tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

- : Membentuk tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;


- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yaitu :
- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
 - b. menyiapkan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
 - c. melakukan reviu terhadap cascading Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
 - d. melakukan pemetaan nomenklatur sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - e. menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
 - f. mengkoordinasikan penetapan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
 - g. menyusun hasil evaluasi terhadap rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;

h. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 03 Maret 2025

an. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Denpasar,


Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 199503 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kota Denpasar
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 03 MARET 2025
NOMOR : 100.3.3.3/643/HK/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR

1. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
3. Kelompok Kerja :
 - Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
 - Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
 - Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Data Dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
 - Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
 - Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

- Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
- Perencana Ahli Pertama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
- Analis Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
- Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

a.n. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Denpasar,



Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP: 19660311 199503 2 001

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√			
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan	√			

Denpasar, 19 September 2025



Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
 Keluarga Berencana Kota Denpasar

Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si
 Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 199503 2 001



ပိယိၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ
Jalan Maruti No. 8 Denpasar Kode Pos 80115 Telepon. (0361) 413357
www.denpasarkota.go.id email: bappeda@denpasarkota.go.id

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra DP3AP2KB Kota Denpasar

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	Mengacu pada INMEN No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perangkat Daerah tidak menyusun visi dan misi, namun telah mengacu dan berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan yang tercantum pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	Strategi dan kebijakan DP3AP2KB Kota Denpasar telah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan DP3AP2KB telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator DP3AP2KB Kota Denpasar telah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan indikator kinerja DP3AP2KB Kota Denpasar telah berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	Pentahapan pelaksanaan program DP3AP2KB sudah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.

Denpasar, 3 September 2025
Kepala Bappeda Kota Denpasar



I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT
Pembina Utama Muda

NIP. 19671007 199703 1 004